Januari 2011

PROGRES

MEDIA KOMUNIKASI TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)

Melihat Pelaksanaan 'Cash for Work' di Merapi

Upaya Memulihkan Kegiatan Ekonomi

SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

TNP2K

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

INSTRUMEN UTAMA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KELOMPOK PROGRAM I

BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA

TUJUAN:
Mengurangi beban rumah tangga miskin melalui peningkatan akses terhadap kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi.

KELOMPOK PROGRAM II

PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TUJUAN:
Mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

Sekretariat TNP2K :
Grand Kebon Sirih Lt 4-6,
Jalan Kebon Sirih No 35
Jakarta Pusat 10110
• Telp 62-21-3912812
• www.tnp2k.wapresri.go.id

KELOMPOK PROGRAM III

PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MIKRO DAN KECIL

TUJUAN:
Memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

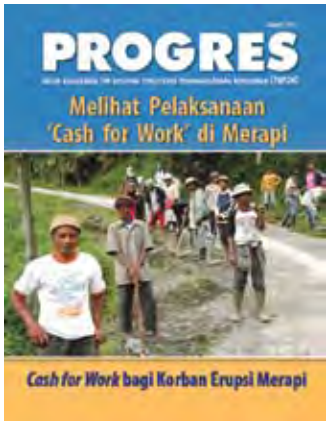

Cover : Sujarwadi
Foto : Sutikno

Bangkit Bersama "Cash for Work"

Upaya pemerintah dalam meringankan beban hidup masyarakat yang terkena bencana erupsi Merapi Jogyakarta, masih terus dilakukan. Bantuan tidak saja dilakukan pada saat masa tanggap darurat namun usai itupun bantuan tetap dilakukan.

Kali ini pemerintah meluncurkan program yang dinamakan *Cash for Work*. Program yang bersifat padat karya itu diperuntukan bagi masyarakat di 4 kabupaten yang terkena langsung dampak erupsi Merapi, yakni kabupaten Magelang, Sleman, Klaten, dan Boyolali.

Menurut Sekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Widianto, program *Cash for Work*memang dirancang untuk meringankan beban masyarakat korban bencana erupsi Merapi.

Untuk tahap pertama program itu dilaksanakan pada Desember 2010 lalu. Dan akan dilanjutkan pada 2011, mengingat manfaat yang dirasakan masyarakat sangat besar.

Meski demikian, bantuan tersebut tidak hanya menyangkut masalah pemulihan ekonomi masyarakat yang sudah terpuruk, namun lebih dari itu secara psikologis mampu meningkatkan semangat hidup baru masyarakat karena adanya perhatian serius dari pemerintah. Dan sebagian besar kalangan masyarakat mulai dari tingkat dusun hingga pemerintah kabupaten dan propinsi, berharap program tersebut dapat terus dilanjutkan karena banyak membawa manfaat.

Seperti halnya Zainudin, 54, yang tinggal di Dusun Ngentak II, Desa Kalibening, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Rumahnya hampir roboh karena atapnya tak kuat menahan tumpukan pasir dan debu yang menempel. Belum lagi hancurnya lahan perkebunannya akibat tertutup abu merapi. Sementara diapun tidak punya penghasilan hingga semangat hidupnya seakan runtuh.

Namun dengan adanya program *Cash for Work* membuat dia kemudian bangkit kembali untuk menata kehidupannya ke depan.

Dan masih banyak tulisan lain yang menyangkut tentang keberhasilan program *Cash for Work* dapat Anda ikuti di edisi ketiga majalah ini. Selain itu, informasi lainnya tentang TNP2K dapat diikuti dalam rubrik PNPM, Kemitraan Dunia Usaha, Pendidikan, Kesehatan, UMK, dan Kabar Daerah. Juga tulisan menarik lainnya bisa diikuti dalam rubrik, Wisata, Rendevouz, Nasional, Ekonomi, dan Lensa Peristiwa.

Selamat membaca.

Pelindung :
Wakil Presiden RI

Penasehat :
- Seswapres RI
- Deputi Seswapres Bidang Kesra
- Staf Khusus Wapres

Penanggung Jawab :
Kepala Sekretariat TNP2K

Pemimpin Redaksi :
Hamka Kurniawan

Redaktur Pelaksana :
Wilson B Lumi

Staf Redaksi :
Utoyo Harjito
K Kuncoro

Tata Letak / Artistik :
Sujarwadi

Alamat Redaksi:
Sekretariat TNP2K,
Gd. Gran Kebon Sirih Lt. 4
Jalan Kebon Sirih No. 35
Jakarta Pusat10110
Telp. : 021-3912812
Fax. : 021-3912511, 3912513
Email : tnp2k@wapresri.go.id

Redaksi menerima tulisan, opini, foto dan surat pembaca yang diketik satu setengah spasi, panjang tulisan maksimal 2 halaman folio. Untuk tulisan dan opini panjang 5.000 karakter dengan disertai foto penulis dan biodata.

Daftar Isi

4 Topik Utama

Adanya program *cash for work* secara nyata telah membantu warga yang tertimpa musibah bencana erupsi Merapi. Program ini juga memulihkan semangat penduduk untuk kembali menata kehidupan mereka.

12 Topik Utama

Cash for Work tahap pertama sudah berakhir 31 Desember 2010. Namun, perlu dipertimbangkan untuk dilanjutkan mengingat masih terdapat sejumlah wilayah di daerah bencana yang belum tersentuh.

14 Topik Utama

Daerah Istimewa Yogyakarta -- salah satu daerah yang terkena bencana di akhir 2010 silam (selain Wasior dan Mentawai)-- kini sudah mulai ramai dikunjungi masyarakat.

42 Nasional

Pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Perlu ada aksi untuk kembali menggalakkan Program KB.

Daftar Isi

Ekonomi

Harga Beras Bikin Was-was

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menurunkan harga beras dan konsumsi beras nasional. Dikhawatirkan bisa berdampak pada jumlah angka kemiskinan apabila harga beras naik.

31 Ekonomi

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menurunkan harga beras dan konsumsi beras nasional. Dikhawatirkan bisa berdampak pada jumlah angka kemiskinan apabila harga beras naik.

Membangun Pariwisata RAJA AMPAT

26 Pariwisata

Keindahan alam Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, tak perlu diragukan lagi. Terutama yang berkaitan dengan lautan, hampir semuanya memiliki potensi pariwisata.

Optimalkan Kekayaan Alam untuk Kesejahteraan

38 Kabar Daerah

Kalimantan, kaya akan sumber daya alam. Salah satu daerah yang memiliki potensi menjanjikan itu adalah Kabupaten Gunung Mas.

Cobek Kokom

Resto Mewah Harga Murah

48 Rendevous

Konsep makanan tradisional yang disajikan di restoran modern sedang menjadi tren saat ini. Bahkan nama restorannya pun dibikin sekampungan mungkin.

Melihat Pelaksanaan 'Cash for Work' di Merapi

Semangat Hidup Itu Muncul Kembali

Adanya program *cash for work* telah membantu warga yang tertimpa musibah bencana erupsi Merapi. Program ini juga memulihkan semangat penduduk untuk kembali menata kehidupan mereka.

Oleh: Wilson B Lumi
Eko Budi Santoso

Memasuki Desa Kalibening, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, disambut debu-debu tipis yang berterbangan di hembus oleh angin. Mereka yang lalu lalang di jalan pun masih harus menutup mata atau hidung untuk menghindari debu yang berterbangan tersebut. Tumpukan pasir pun terlihat di setiap halaman rumah yang ada di desa itu. Pemandangan itu bukan mengisyaratkan masyarakat Desa Kalibening tengah membangun rumah. Tapi, debu dan tumpukan pasir itu, merupakan sisa-sisa erupsi Merapi beberapa waktu yang lalu.

Jarak antara desa Kalibening dengan Gunung Merapi hanya 6,8 kilometer, tak pelak desa ini pun masuk daerah berbahaya kala Merapi memuntahkan isi perutnya. Menurut keterangan Ali Setyadi, Camat Dukun, desa dan dusun yang jaraknya berada di radius sekitar 7 kilometer dari Merapi dinyatakan sebagai daerah Kawasan Rawan Bencana (KRB) 3. Desa Kalibening tidak sendiri, di Kecamatan Dukun ada 8 desa yang terdiri dari 64 dusun yang dinyatakan sebagai daerah KRB-3.

Atas dasar itu, 64 dusun yang berada di Kecamatan Dukun, ditetapkan menerima bantuan program *cash for work* yang disalurkan melalui kantor Dinas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Magelang. Khusus untuk Kabupaten Magelang, ada tiga kecamatan yang terdiri dari 19 desa yang menerima bantuan program *cash for work* senilai Rp 4,65 miliar.

Masyarakat di kawasan 19 desa itulah yang dinilai oleh pemerintah Kabupaten Magelang, paling membutuhkan bantuan dana untuk dapat melanjutkan kehidupannya. Seperti yang diungkapkan oleh Ali, sejak pulang dari pengungsian dan diperbolehkan kembali menghuni rumah mereka, masyarakat di Kecamatan Dukun menjadi bingung tak tahu apa yang harus dilakukan. Sarana umum seperti jalan tak dapat dilewati karena tertimbun pasir dan banyak pohon tumbang. Mau mengolah lahan pertanian pun masih tertutup debu. Jangankan lahan pertanian, melihat kondisi rumah mereka juga sangat memprihatinkan.

Adanya program *cash for work* ini , kata Ali, membuat semangat hidup warganya kembali muncul. Warga Kecamatan Dukun pun menyambut dengan begitu antusias. Program *cash for work* ini mirip dengan program padat karya. Jadi warga melakukan berbagai pekerjaan seperti membersihkan dan memperbaiki kembali lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka yang porak poranda. Pekerjaan yang mereka lakukan dibayar dengan upah Rp 30 ribu per hari. Dari hasil yang didapat dari program tersebut, masyarakat mulai bisa mencukupi kebutuhan pokoknya. "Warga mulai bisa membeli kebutuhan pokok mereka," kata Ali. Di Kecamatan Dukun ada sekitar 20 ribu orang yang terlibat dalam program *cash for work*.

Salah satu dari puluhan ribu warga tersebut adalah Zainudin, 54, yang tinggal di Dusun Ngentak II, Desa Kalibening, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Pria berperawakan kurus ini, memiliki lahan pertanian seluas kurang lebih 2000 meter persegi. Lazimnya lahan itu ditanami oleh sayur-sayuran oleh bapak tiga orang anak ini. Sebelum erupsi merapi, lahan itu sempat ditanami cabe. Apa daya tanaman cabe di lahan itu mati semua diguyur abu merapi. Seharusnya bila bencana itu tidak datang, saat ini Zainudin tengah menikmati panen cabe. Dengan lahan seluas itu, Zainudin bisa menghasilkan 160 kilogram cabe "Padahal harga cabe sekarang sedang bagus, sayang saya tidak bisa menikmatinya,"ujar Zainudin lirih.

Tak hanya lahan pertaniannya yang rusak, setelah ditinggal mengungsi selama 20 hari, rumahnya pun hampir roboh, karena atapnya tak kuat menahan tumpukan pasir dan debu yang menempel. "Pokoknya kondisi rumah tidak karuan, sementara saya pun tidak punya penghasilan," katanya sambil menitikan air mata. Bersama para tetangganya, Zainudin pun mengikuti program *cash for work*. Mereka bekerja membersihkan jalan-jalan desa yang tertutup pasir, krikil, serta menyingkirkan pohon-pohon tumbang yang malang melintang dari jalan. Saluran irigasi yang tertutup pasir pun dibersihkan, begitu juga dengan

FOTO: TNP2K/SUTIKNO

Musholla tempat warga sekitar beribadah.

Dalam program ini Zainudin bekerja selama 18 hari kerja, jadi total pendapatan yang diperolehnya Rp 540 ribu (18 X Rp 30 ribu). Hasil yang diperolehnya itu sangat disyukuri oleh Zainudin. Sebagian dari penghasilannya itu disisihkan untuk modal menanam kacang tanah di lahan seluas 1000 meter persegi. Untuk kembali menanam cabe, diakui oleh Zainudin, belum memiliki modal yang cukup. Untuk bertanam cabe sedikitnya dibutuhkan modal Rp 1,5 juta per 1000 meter persegi, sementara untuk bertanam kacang tanah hanya sekitar Rp 100 ribu saja. "Sekarang saya harus memulai lagi

dari awal," ujar Zainudin sambil menyeka matanya yang masih tetap saja basah.

Dikemukakan oleh kepala desa Kalibening, Nurbiyanto, seluruh warganya memang harus memulai kehidupan dari awal lagi. Selama ini, sebagian besar warga desanya merupakan petani salak dan hortikultura (sayur mayur). Dan kini seluruh lahan pertanian itu rusak parah. Biasanya para petani dapat memanen salaknya paling sedikit semingu sekali. Kini mereka harus menunggu kurang lebih tiga tahun lagi bisa panen salak. Dengan kondisi seperti itu, Nurbiyanto sangat menyambut baik adanya program *cash for work*. Selain mendatangkan pendapatan bagi warganya, kerusakaan fasilitas umum dan sosial di desanya pun dapat diperbaiki.

Kisah serupa juga dialami oleh Sukimin, 47, warga Dusun Pole, Desa Tegalrandu, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. Penduduk di Dusun yang terletak di kaki Gunung Merapi itu juga harus mengungsi 40 hari. Tak pelak, jalan desa, rumah dan lahan pertanian di dusun itu tertutup pasir vulkanik setinggi rata-rata 20 centimeter. Tak hanya itu sumur yang merupakan mata air warga pun harus terkubur pasir (mati). Kini di dusun itu, 114 kepala keluarga hanya mengandalkan satu sumur saja untuk pasokan kebutuhan air bersih mereka.

Diceritakan oleh Sukimin, adanya program *cash for work* sangat membantu dirinya dan juga para warga di Dusun Pole. "Alhamdulillah, dana yang diteri-

FOTO: TNP2K/SUTIKNO

Zainuddin dan istri

Djiwan Sutopo, Camat Selo

Sugianto, Kadis Nakertrans Boyolali

Slamet, warga Selo

Joko Indriyo, Kadis Nakertrans Klaten

ma itu,saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga,"kata Sukimin. Selain menghidupi tiga anaknya Sukimin juga harus menyokong hidup ke dua orangtuanya yang sudah berumur. Sebelum Merapi meletus di lahan milik Sukimin seluas 3000 meter persegi ditanami padi dan cabe. Lahan yang sudah ditanami itu pun rusak diguyur debu Merapi.

Lima Dusun Lenyap

Kini Sukimin dan para tetangganya mulai menata kehidupan mereka kembali. Diakui olehnya, jika tidak ada program padat karya (*cash for work*) mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk membersihkan dan menata lingkungan di sekitar dusun Pole.

Menurut kepala desa Tegalrandu, Siti Kowiyah, kegiatan ekonomi masyarakat di desa tersebut nyaris lumpuh. Kegiatan budidaya ikan yang dulu menjadi usaha sampingan masyarakat di desa ini juga rusak total. Di bidang budidaya perikanan, menurut Siti, kerugian yang diderita Desa Tegalrandu mencapai sekitar Rp 468 juta. Diakui oleh Siti, adanya program *cash for work* ini selain membantu pendapatan warga juga mampu memompa semangat hidup warganya yang terpuruk sejak erupsi merapi meletup.

Semantara itu warga di 13 desa (lima kecamatan) di Kabupaten Sleman juga merasakan manfaat dari program *cash for work* ini. Di kabupaten ini diperkirakan 2.800 orang terlibat aktif dalam program padat karya ini. Pekerjaan yang dikerjakan oleh para warga di kabupaten ini hampir sama seperti di Kabupaten Magelang. Seperti membersihkan saluran irigasi, rehabilitasi jalan, serta membersihkan lahan pertanian dan sarana umum lainnya.

Di kabupaten ini memang ada daerah-daerah yang kondisinya sangat parah. Tak hanya sarana infrastrukur yang hancur, dusun tempat tinggal mereka pun terkubur material Merapi. Kini kondisinya tak jauh berbeda layaknya padang pasir. Tengok saja kondisi Desa Kepuharjo. Kecamatan Cangkringan, erupsi Merapi mengakibatkan lima dusun (Kepuh, Manggong, Jambu, Petung dan Kaliadem) di desa itu hilang. Itu artinya sekitar 1800 orang harus kehilangan tempat tinggal dan juga mata pencaharian. Kawasan yang tadinya subur ditumbuhi tanaman padi dan sayur mayur kin berubah menjadi gundukan pasir. Rumah mereka, kini hanya tersisa puing-puingnya saja, hangus terbakar oleh hembusan awan panas. Kini bila malam hari tiba, daerah itu gelap dan sunyi senyap. Suara jangkrik dan hewan malam lainya yang lazimnya sering bersahutan, tak terdengar lagi, yang terdengar hanya deru angin malam saja.

Di Cangkringan ada lima desa yang menerima bantuan program *cash for work.* Tentu saja kehadiran program seperti ini benar-benar sangat membantu para warga di sana. Ternyata program ini tidak hanya membantu para korban Merapi dari sisi ekonomi. Lebih dari itu program ini mampu membangkitkan kembali semangat dan harapan hidup bagi orang-orang seperti Zainudin dan Sukimin.

Titikkan Air Mata

Apa yang dialami warga di Magelang dan Sleman juga dirasakan oleh penduduk di Klaten dan Boyolali, di sebelah Timur dan Selatan Merapi. Dahono adalah salah satu warga dari sekian banyak penduduk di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah tepatnya di Desa Sambungrejo, Balerante, yang ikut terpukul menyusul erupsi Merapi beberapa waktu lalu.

FOTO-FOTO: TNP2K/SUTIKNO/WILSON

Gito Suar, warga Boyolali

Dahono, warga Sambungrejo

Damar Mardono, Kades Tangkil

Arso Danu warga Tangkil

Menurut Dahono, beberapa saat setelah erupsi Merapi warga beranggapan semuanya sudah selesai. Erupsi Merapi telah mengakibatkan seluruh harta benda mereka lenyap ditelan lahar panas dan wedhus gembel. Semuanya habis tak bersisa. Mulai dari ternak sapi, kambing hingga barang-barang tak bergerak diantaranya, barang elektronic (televisi/recorder), peralatan rumah tangga hingga lahan pertanian sampai rumah tinggalpun habis seperti di telan bumi.

Widodo, TKSK

Sukimin

Saat berbicang dengan PROGRES TNP2K, Dahono yang kini sedang menantikan kelahiran anaknya yang ketiga dari dua kali perkawinannya, mengatakan, pasca erupsi Merapi semuanya gelap. Tidak punya harapan hidup. Lahan-lahan pertanian terlihat bagai padang pasir, tertutup abu vulkanik Merapi. Pepohonan, termasuk tanaman keras lain di lahan pertanian warga, tertinggal induk batangnya, sebagian lagi terlihat seperti ranting kering tak berdaun. Tanaman pertanian kelapa terlihat semuanya merunduk. "Dengan kondisi seperti ini, tidak ada seorang pun warga yang dapat bertahan hidup," aku Dahono sembari menitikkan air mata mengenang kepedihan ketika itu.

Seperti gayung bersambut, pemerintah menggelontorkan program *cash for work* untuk meringankan beban masyarakat korban bencana erupsi Merapi. "Program ini bagai setetes embun di tengah gurun pasir," ungkap Damar Mardono, Kepala Desa Tengkil, Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Menurutnya, dengan program yang dikenal dengan istilah padat karya ini, masyarakat di daerahnya mengaku sangat terbantu. Pasalnya, pasca erupsi Merapi, semua penduduk diungsikan ke tempat-tempat yang lebih aman. Dengan begitu, dipastikan –dalam pengungsian— tidak ada yang memperoleh penghasilan. "Jangankan penghasilan, makan saja semuanya hanya menunggu turunnya bantuan dari pemerintah atau berharap pada keringanan tangan simpatisan," jelas Mardono.

Dikatakan Joko Indriyo, Kadis Nakertrans Kabupaten Klaten, bahwa hadirnya program *cash for work* telah ikut mengatasi beberapa masalah sekaligus, diantaranya mempercepat berfungsinya sejumlah fasilitas umum, seperti pengairan yang dulunya tak berfungsi akibat tersumbat abu vulkanik yang sudah mengeras dan tersumbat lonsoran. Selain itu, warga yang sebelumnya tidak punya penghasilan, kini bisa memperoleh pendapatan harian.

"Warga begitu gembira dengan penghasilan Rp 30.000/hari, sehingga hanya dalam

hitungan hari, beberapa lokasi yang porak-poranda oleh erupsi Merapi, termasuk sejumlah lahan pertanian, mulai kembali," tambah Djiwan Sutopo, Camat Selo, Kabupaten Boyolali yang tidak henti-hentinya melakukan pemantauan di daerah terkena dampak erupsi Merapi di wilayah kerjanya.

Pokoknya, aku Dahono, senang sekali bisa mendapat pekerjaan dan memperoleh uang. Sebab, dengan uang ini kami bisa perlahan-lahan membangun kembali perekonomian keluarga. Minimal bisa memenuhi kebutuhan makan keluarga sehari-hari setelah keluar dari pengungsian. "Uang dari hasil bekerja ini menjadi penyelamat kala kita tidak punya apa-apa lagi. Dan, jika bisa, kami berharap program ini masih tetap bergulir sampai keadaan normal. Kami masih sangat membutuhkannya," ujar Dahono.

Dahono seperti kebanyakan warga disekitar Gunung Merapi yang masih berharap pada kelanjutan program padat karya. Pasalnya, selain masih banyak yang perlu dibangun dengan sistem kerja gotong royong menuju pemulihan, sambil menunggu tanah pertanian berproduksi, tidak sedikit warga yang kini hanya mengandalkan penghasilan dari program *cash for work*.

Nada serupa diungkapkan Slamet dan Gito Supar, warga desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Menurut keduanya, pasca erupsi Gunung Merapi, semua penduduk tidak bisa berbuat apa-apa lagi.

"Semuanya habis. Dalam pengungsian, kami seolah menunggu mati saja. Sampai akhirnya, kami diberi kesempatan untuk mengikuti program padat karya yang diadakan khusus untuk penataan kembali lingkungan yang terkena muntahan abu vulkanik Merapi. Kami senang bisa bekerja dan mendapatkan uang. Meski kecil, namun uang ini sudah bisa kami gunakan untuk biaya hidup sehari-hari (makan) dan modal usaha (beli bibit)," jelas Gito Supar dengan mata berkaca-kaca.

"Biasanya, kalau hanya untuk biaya hidup sehari-hari, kami cukup mengandalkan dari penjualan sayur-mayur. Tapi, pasca erupsi Merapi, ladang kami rata bagai padang pasir. Semuanya rusak tertup muntahan lahar Merapi. Dengan adanya program padat karya ini, seperti pepatah menyebut, sekali mendayung dua tiga pulau terlewati. Artinya, tanah

FOTO: TNP2K/SUTIKNO

pertanian, fasilitas umum bisa kembali difungsikan, peserta programpun mendapatkan penghasilan yang bisa digunakan untuk mencukupi kerbutuhan makan dan modal kereja," aku Arso dan Danu, warga Tangkil, Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Warga disekitar Gunung Merapi memang belum bisa hidup mandiri. Semua yang mereka andalkan habis sudah direngut Merapi.

Satu-satunya yang yang mereka bisa lakukan kini adalah mengumpul modal sedikit demi sedikit, satu-satunya dari hasil bekerja pada program padat karya. Dan, dari penelusuran tim PROGRES TNP2K, program *cash for work* yang dikucurkan pemerintah pada Desember 2010 dana yang terpakai sebesar Rp. 8,77 milar dari total anggaran Rp. 15 miliar, sangat dirasakan manfaatnya.

"Kami berharap, pemerintah bisa melanjutkan program ini. Kami melihat warga yang terkena bencana di sekitar lereng Merapi ini masih sangat membutuhkannya. Sebab untuk pemulihan sampai keadaan bisa normal, masih butuh waktu. Nah, kalau kita putuskan tanpa perhatian, rasanya sulit bagi mereka untuk bisa bangkit dan mandiri," harap Widodo, Tenaga Kerja Sukarela yang bertugas di wilayah Kecamatan Selo, Boyolali.

Dan, memang sebagaimana pengakuan Sugianto, SH., MM., Kadis Nakertrans, Kabupaten Boyolali, bahwa diwilayahnya masih sangat banyak infrastruktur dan lahan pertanian yang belum pulih, terutama di daerah Tiogolele, Klakah, Suroteleng, dan Samiran. Program *cash for work* di Kabupaten Boyolali tahap pertama memperoleh kucuran dana sebesar Rp. 550.000.000 dan telah terserap 100 persen dengan menyerap sebanyak 1.391 tenaga kerja.

Secara keseluruhan alokasi dana *cash for work* Propinsi Jawa Tengah adalah Rp 5,77 miliar.Dana tersebut digunakan untuk membiayai program padat karya dalam rangka pemulihan dampak erupsi Merapi di tiga kabupatan yang terkena bencana, masing-masing Kabupaten Magelang sebesar Rp 4,65 miliar, Kabupaten Klaten Rp 570 juta, dan Kabupaten Boyolali sebesar Rp 550 juta.

Sementara untuk propinsi DI Yogjakarta sebesar Rp 3 miliar. Khusus Yogyakarta, daerah yang terkena dampak erupsi Merapi adalah di Kabupaten Sleman yang melingkupi 13 desa di 5 kecamatan. ■

FOTO: TNP2K/SUTIKNO

Upaya Memulihkan Kegiatan Ekonomi

FOTO: TNP2K/SUTIKNO

Bambang Widianto, Deputi Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K

***Cash for Work* tahap pertama sudah berakhir 31 Desember 2010. Namun, perlu dipertimbangkan untuk dilanjutkan mengingat masih terdapat sejumlah wilayah di daerah bencana yang belum tersentuh.**

Oleh: Wilson B Lumi

Pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat yang terkena dampak bencana Merapi, baik yang masih dalam pengungsian ataupun yang sudah bisa memulai aktivitasnya, perlahan mulai mengalami proses pemulihan. Namun demikian, masih diperlukan perhatian serius dari pemerintah dalam rangka keberlanjutan program pemulihan pasca erupsi Merapi.

Bambang Widianto, Deputi Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan selalu Sekretaris Eksekutif TNP2K, menjelaskan, cash for work memang dirancang untuk meringankan beban masyarakat korban bencana erupsi Merapi.

Untuk tahap awal program tersebut dilakukan pada Desember 2010 lalu. Dan rencananya akan terus dilanjutkan pada 2011 mengingat manfaat yang sudah dirasakan masyarakat sangat besar.

"Untuk itu, setelah mengadakan penjajakan kita memutuskan menggunakan dana yang bersumber dari dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dana ini dialokasikan di daerah bencana sebagai stimulus tahap pertama. Sementara untuk tahap kedua (Januari-April 2011) akan menggunakan dana hibah melalui PNPM Support Facilities (PSF)," kata Bambang.

Tahap pertama (Desember 2010), kata Bambang, setelah berkoordinasi dengan BNPB bahwa untuk program *cash for work* telah disiapkan dana sebesar Rp 15 miliar.

Dana Siap Pakai BNPB untuk *cash for work* dilaksanakan melalui mekanisme Padat Karya sesuai prosedur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pelaksanaannya dilakukan oleh Disnaker kabupaten setempat. Proses administrasi telah diselesaikan dan rapat koordinasi telah dilakukan sejak awal Desember 2010.

Sementara alokasi dana untuk tahap kedua, PSF menyetujui penggunaan dana hibah untuk Program *cash for work* dengan menggunakan mekanisme PNPM Mandiri yang dimodifikasi sesuai dengan situasi bencana. Rapat koodinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain dengan Kementerian Koordinator Bidang Kesra, Kemendagri, Kementerian PU, BNPB, dan PSF didampingi Prof . Dr. Danang Parikesit selaku Direktur LPPM Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk memberi masukan mengenai modifikasi mekanisme pelaksanaan PNPM Mandiri dan penajaman targeting.

"Mekanisme penargetan sasaran dirumuskan melalui rakor di TNP2K yang dihadiri oleh Kemenakertrans, PNPB, PSF dengan memperoleh masukan dari LPPM-UGM," tambah Bambang.

Menurut Bambang, pemberian *cash for work* berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten melalui Disnakertrans. Selanjutnya usulan pendataan dan jenis kegiatan diverifikasi oleh BNPB didampingi LPPM UGM sesuai dengan tatacara pemanfataan dana siap pakai PNPB. "Dengan begitu, pemanfaatan dana *cash for work* dapat dipertanggungjawabkan," jelas Bambang.

Ditambahkan, pelaksanaan *cash for work* tahap pertama

dilakukan dengan cara BNPB mengalokasikan dana langsung kepada masing-masing pemerintah kabupaten sesuai dengan pendataan dan jenis kegiatan diverifikasi. Khusus untuk *cash for work* melalui PNPM Mandiri penajaman targeting sedang dilakukan bersama-sama Kemenko Kesra, Kemendagri, Kementerian PU dan LPM UGM.

Program *cash for work* telah dilaksanakan melalui mekanisme Kemenakertrans. Dimulai pada 10 Desember dan telah berakhir pada 31 Desember 2010. Dari alokasi dana sebesar Rp 15 juta yang disediakan oleh PNPB, hanya terserap sebesar Rp 8,77 miliar mengingat batas pencairan anggaran siap pakai hanya sampai dengan akhir masa tanggap darurat yaitu pada 9 Desember 2010. Namun demikian, pelaksanaannya dapat dilakukan sampai dengan akhir bulan Desember 2010.

Perlaksanaan program *cash for work* ini mencakup 4 kabupaten, masing-masing Kabupaten Slemen (Jogyakarta), Kabupaten Klaten, Magelang, dan Kabupaten Boyolali (Jawa Tengah) dengan melibatkan kurang lebih 14.000 orang.

Sedangkan dana PSF, untuk program *cash for work* dijadwalkan dilaksanakan Januari hingga April 2011. Persetujuan resmi dari PSF telah diterbitkan pada 15 Desember 2011 dengan alokasi dana sebesar US$ 30 juta, termasuk untuk membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Mentawai dan Wasior.

Berkaitan dengan program *cash for work* lanjutan di daerah bencana Gunung Merapi pada saat ini, sedang dilakukan pembahasan dengan PSF dan Kementerian Keuangan tentang tatacara terbaik dan secepat mungkin untuk menyalurkan dana tersebut kepada Kemendagri dan Kementerian PU sebagai pelaksana PNPM Mandiri.

"Untuk itu juga sedang dilakukan koordinasi pelaksanaan implementasi yang melibatkan Kemenko Kesra, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendagri, Ditjen Cipta Karya Kementerian PU, dan LPPM Universitas Gadjah Mada. Diharapkan pada awal 2011 ini juga, program *cash for work* melalui PNPM Mandiri sudah dapat dilaksanakan," harap Bambang. ■

FOTO: WILSON

Mentawai

FOTO: ISTIMEWA

Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Progres 2011

Daerah Istimewa Yogyakarta -- salah satu daerah yang terkena bencana di akhir 2010 silam (selain Wasior dan Mentawai)-- kini sudah mulai pulih. Namun demikian, masih diperlukan keseriusan berbagai pihak, tidak saja pemerintah untuk mengembalikan daerah wisata itu kembali normal seperti semula.

Oleh: Wilson B Lumi

Rehabilitasi dan rekonstruksi beberapa wilayah di Indonesia yang terkena bencana alam di akhir tahun 2010, yaitu Wasior di Papua Barat, Mentawai di Sumatera dan dampak erupsi Gunung Merapi di Yogjakarta, menjadi prioritas utama program pemerintah.

Program pemerintah ini disampaikan Menteri Koordinator Kementerian Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono pada Rapat Kerja tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2011, di Jakarta Convention Center, yang dihadiri para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia.

Menurut Agung, selain program rekonstruksi dan rehabilitasi daerah bencana, pemerintah juga memunyai beberapa program lain.

Mengingat letak geografis Indonesia, diperkirakan masih akan terjadi lagi bencan alam di berbagai wilayah di Indonesia. Untut itu, kesadran dan kesiapan berbagai unsur masyarakat perlu ditingkatkan. Untuk

itu Indonesia akan menjadi tuan rumah ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF-DiREX) 2011 yang akan dipusatkan di Manado, Maret 2011.

"Oleh karenanya, ini harus disiapkan dengan baik dan matang," kata Agung Laksono.

Selain agenda internasional tersebut, tambah Ketua DPR-RI 2004-2009 ini, sudah harus disusun peta risiko bencana nasional (tingkat provinsi) di 33 provinsi. Rencana penanggulangan bencana daerah di 33 provinsi dan sertifikasi 10.000 relawan juga menjadi program penting yang harus diselesaikan tahun berjalan ini.

Berbagai bencana alam seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi yang diikuti terjadinya tsunami masih tetap menghantui berbagai daerah di tanah air.

Masalah lingkungan hidup, tahun 2011 pemerintah berupaya mewujudkan program-program pengendalian pencemaran lingkungan, di antaranya pengawasan pencemaran di 750 perusahaan, pengendalian kerusakan, seperti menurunkan jumlah titik api (*hotspot*) di 8 propinsi melalui pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, serta mengantisipasi perubahan Iklim dengan progres menuju pengurangan emisi 26 % pada tahun 2020. "Pemerintah juga akan menindak-lanjuti kerjasama Internasional, antara lain COP 17 UNFCCC (*climate change conference*)."

"Selain itu, tantangan di bidang pengelolaan bencana yang dihadapi kini, di antaranya terdapat 386 Kabupaten/kota daerah rawan bencana. Sementara BPDB, baru terbentuk di 31 provinsi dan 274 Kabupaten/Kota. Untuk itu diharapkan pada 2011 juga seluruh BPBD harus segera terbentuk," tandas Agung. ■

PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA TAHAP I

Latar belakang

- Sementara masih dilakukan perhitungan untuk penyiapan program rehabilitasi dan rekonstruksi, penduduk yang terkena bencana tidak perlu menunggu terlalu lama untuk dapat beraktifitas sosial-ekonomi . Maka diperlukan upaya tambahan, salah satu upaya strategis adalah padat karya (Cash For Work)
- Cash For Work: Pekerjaan bersifat jangka pendek untuk tenaga kerja yang tidak berkeahlian.
  Tujuan utamanya adalah meningkatkan jumlah uang beredar di daerah bencana dengan harapan dapat menghidupkan kembali aktivitas ekonomi.
- Dalam konteks bencana:
  Cash For Work adalah program untuk melibatkan masyarakat dalam pembersihan lingkungan terkena bencana, sekaligus suatu cara untuk memberikan uang tunai, dan memicu kegiatan ekonomi.

Tujuan

- Memberikan bantuan kepada penduduk terkena bencana, baik yang pengungsi maupun penduduk lokal yang kehilangan usaha dan pekerjaannya, agar mempunyai uang tunai untuk memulai kehidupan dan pekerjaannya.
- Memfungsikan kembali secara minimal prasarana dan sarana umum untuk mendukung dimulainya kembali kehidupan sosial ekonomi masyarakat di lokasi bencana.

Pentargetan

SASARAN

Penduduk yang terkena dampak bencana di lokasi bencana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

LOKASI

Kabupaten Sleman Propinsi DIY, serta Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali di Propinsi Jawa Tengah.

KRITERIA

a. Pengungsi yang masih berada di titik-titik pengungsian yang tersebar di lokasi bencana pada kabupaten-kabupaten tersebut di atas;
b. Pengungsi yang telah memperoleh Hunian Sementara (Huntara);
c. Pengungsi yang kembali ke desa tempat tinggal semula di lokasi-lokasi bencana;
d. Penduduk di lokasi-lokasi bencana yang tidak mengungsi namun kehilangan usaha/pekerjaannya akibat bencana;

Evaluasi Tahap I

1. Capaian

Anggaran Diusulkan	Rp. 8,770,000,000
Anggaran Terserap	Rp. 8,097,290,000
Tingkat Penyerapan	92%
Sisa Anggaran	Rp. 672,710,000
Tenaga Kerja Terserap	18,294 orang
Jumlah Hari Orang Kerja	207,353 HOK
Jumlah Kelompok	577 Kelompok
Jumlah Kabupaten	4 kabupaten
Jumlah Kecamatan	10 kecamatan
Jumlah Desa	48 desa
Perbandingan upah vs. pengadaan alat (average)	Rp. 6,767,200,000 untuk upah (84%) dan Rp. 1,285,220,000 untuk pembelian alat (16%)

2. Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penerima program padat karya meliputi:

Umum

Pembersihan, penataan, dan pemulihan fungsi lingkungan yang terkena dampak erupsi Gunung Merapi.

Khusus

- Perbaikan lingkungan perumahan.
- Perbaikan prasarana dan sarana fisik:
  - Pipanisasi air bersih, pengerukan saluran drainase, jalan desa.
  - Fasilitas umum/sosial (sarana pendidikan, kesehatan, balai desa).
- Perbaikan sarana produksi masyarakat
  - Lahan pertanian, lahan perkebunan.

3. Manfaat Pelaksanaan

- Segera dapat memenuhi kebutuhan sosial dasar secara minimal.
- Membangkitkan motivasi akan adanya harapan hidup yang baik.
- Mendapatkan modal usaha dan produksi.
- Terbukanya akses jalan ke berbagai lokasi dan perbaikan lingkungan

Pembelajaran

Kekuatan

- Di masyarakat terjadi sinergi kegiatan dan pendanaan dengan kegiatan lain, sehingga realisasi fisik di berbagai lokasi melebihi harapan.
- Membangkitkan motivasi dan memunculkan kembali karakter masyarakat "bergotong-royong dan saling menolong" (kohesi sosial).
- Menjadi bahan atau model untuk membangun sistem pemulihan ekonomi masyarakat untuk menyambung hidup (survive) sebelum dilaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kelemahan

- PTO pelaksanaan tidak tersedia (karena sesuatu hal yang baru).
- Juknis administrasi pelaksanaan anggaran belum tersedia
- Alokasi anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan karena proses perencanaan yang sangat singkat (kondisi darurat)
- Penerimaan income per individu lebih kecil karena banyak terjadi perluasan peserta padat karya.

PNPM Angkat Derajat Kelompok Miskin

PNPM Mandiri telah memberikan kontribusi besar bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena PNPM Mandiri mendidik masyarakat untuk menjadi berdaya dan mandiri.

Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Sujana Royat, menyampaikan bahwa penurunan kemiskinan di Indonesia per tahun paling cepat dibandingkan dengan negara lain, yakni 0,8 persen, sedangkan China 0,15 persen, Brazil 0,11, Filipina 0,01 persen. Sementara India minus 0,18 dan Meksiko minus 0,48 persen yang berarti angka kemiskinan bertambah.

Jumlah orang miskin Indonesia per Maret 2009 tercatat lebih dari 32,53 juta orang, sementara, 2010 pada periode yang sama, menyebutkan sudah menurun menjadi 31,02 juta orang. "Jumlah orang miskin menurut data BPS berkurang setiap tahun. Sekitar 1,2 juta orang miskin per tahun meningkat kesejahteraannya, dimana sebaian besar didorong oleh program-program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri. PNPM Mandiri telah berhasil membantu masyarakat kelas bawah meningkatkan kesejahteraannya," tegasnya.

Menurut Sujana, PNPM salah satu dari tiga klaster program penanggulangan kemiskinan. Klaster I, adalah program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga; klaster II, berbasis pemberdayaan masyarakat ;dan klaster III, pemberdayaan usaha mikro dan kecil. "Klaster I ditangani dengan menyediakan ikan, bantuan langsung bagi masyarakat yang sudah benar-benar tidak berdaya, klaster II dengan menyediakan kail bagi masyarakat agar mereka bisa memberdayakan diri sendiri dan klaster III bagi mereka yang membutuhkan perahu," katanya.

Jika klaster I ditangani dengan sejumlah program seperti beras miskin (raskin), pengobatan gratis (Jaminan Kesehatan Masyarakat), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan lainnya, sementara klaster II diwujudkan dalam bentuk PNPM Mandiri.

PNPM Mandiri, lanjut dia, diharapkan dapat mendidik masyarakat menjadi berdaya dan mandiri, di mana masyarakat diminta untuk bermusyawarah menentukan proyek apa yang cocok bagi mereka, dan kemudian bergotong-royong melaksanakannya. Dana anggaran PNPM Mandiri pada 2011 mencapai Rp10,5 triliun, turun dari dana PNPM Mandiri 2010 sebesar Rp12 triliun, sementara pada 2009 sebesar Rp9,9 triliun.

Terkait dengan penurunan angka kemiskinan, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto mengatakan bahwa sasaran tingkat kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 sebesar 12-13,5 persen tercapai. Menurutnya, pada tahun 2007 menunjukkan data 16,58 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan, lalu angka kemiskinan turun pada 2008 menjadi 15,42 persen, pada 2009 turun lagi menjadi 14,15 persen, dan turun kembali menjadi 13,33 persen pada 2010. "Kita optimistis proyeksi pada 2011 ini angka kemiskinan bakal terus turun menjadi 11,5- 12,5 persen," katanya.

Manfaat Besar

Manfaat PNPM Mandiri memang bukan sekadar obral janji pemerintah. Mantan fasilitator PNPM Mandiri, Lilis Setyawaty juga membenarkan besarnya manfaat program tersebut bagi masyarakat. "Sangat besar manfaatnya, warga sendiri yang mengatakannya. Dan kami se-

BIROKRAT.BLOGSPOT.COM

Dengan bantuan permodalan dari KUR, masyarakat dapat mengembangkan usahanya.

bagai orang-orang yang pernah terlibat mendampingi mereka menilai program ini sangat bagus untuk meningkatkan perekonomian rakyat," kata wanita yang sudah sejak 2003 berkecimpung di dunia pemberdayaan rakyat ini.

Menurut dia, banyak dari warga yang dulunya hanya punya warung kecil yang isinya hanya beberapa jenis, sekarang sudah berkembang menjadi toko kelontong, juga yang dulunya miskin karena tak punya pekerjaan sekarang punya warung gado-gado dengan banyak pelanggan.

Manfaat itu, urai Lilis, khususnya untuk porsi pemberdayaan ekonomi berupa dana bergulir yang sayangnya sejak 2007 komposisi ini semakin kecil. "Sejak 2007 komposisi peruntukan terbesar adalah bagi pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, selokan dan lainnya. Untuk wilayah kelurahan saya di Jakarta mencapai 90 persen untuk fisik dan 10 persen untuk sosial seperti peralatan Posyandu atau alat bantu pendidikan anak usia dini (PAUD)," katanya.

Dikatakannya, manfaat dari dana bagi pembangunan fisik dan sosial, tidak bersifat langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan dana bergulir. "Pendapat saya pembangunan fisik itu tugasnya Dinas Pekerjaan Umum Pemda. Karena itu akan lebih baik jika komposisi dana bergulir diperbesar lagi porsinya seperti pada masa lalu," katanya. PNPM Mandiri merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang berjalan sejak 1998-1999. Isilah PNPM Mandiri muncul pada 2007. *(WL/antaranews.com)*

Pengembangan Wirausaha Kelautan dan Perikanan

Implementasi program PNPM Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu meningkatkan pengembangan wirausaha kelautan dan perikanan masyarakat di pedesaan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad melepas varietas unggul ikan Nila Larasati dan ikan Nila Best.

DETIKFOTO

Oleh: Wilson B Lumi

Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGR) yang merupakan bagian dari program PNPM Kelautan Perikanan akan segera dilaksanakan di 40 kabupaten/kota yang disebar pada 41 titik lokasi.

"Rencana pengembangan kawasan minapolitan percontohan di 41 lokasi tersebut, terdiri dari 9 lokasi minapolitan berbasis perikanan tangkap, 24 lokasi minapolitan berbasis perikanan budidaya, dan 8 lokasi sentra garam," kata Menteri Kelautan Perikanan Fadel Muhammad beberapa waktu lalu.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan produksi perikanan tahun 2011 sebesar 12,26 juta ton yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar 5,41 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 6,85 juta ton. Untuk mencapai target tersebut KKP akan memfokuskan perhatian pada program minapolitan di lokasi yang telah ditetapkan.

Selain itu, ungkap Fadel, KKP akan merancang proyek Mega Minapolitan di Morotai yaitu Minapolitan dalam skala yang lebih besar. Menurut Fadel, Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) yang merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan dan Perikanan pada 353 kabupaten/kota.

PUMP akan meliputi bantuan langsung pada kelompok masyarakat untuk penyediaan sarana usaha seperti, paket peralatan dan operasional penangkapan, yang meliputi biaya operasional penangkapan (BBM, es, logistik ABK, air bersih), bahan dan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, serta galangan rakyat (perbengkelan nelayan).

Fadel Muhammad

FOTO: TNP2K/KUNTHO

Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) yang merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan dan Perikanan pada 353 kabupaten/kota.

Paket sarana produksi budidaya meliputi benih, pakan, obat-obatan, perawatan saluran dan kolam, alat dan mesin pendukung budidaya.

"Untuk paket sarana pengolahan ikan meliputi alat pengolahan bakso ikan, nugget ikan, abon ikan, pengemasan produkolahan ikan, pengolahan rumput laut, kerupuk ikan, sosis ikan dan kaki naga," demikian dikatakan Fadel seperti dilansir dari *depkominfo.go.id.*

Diharapkan, melalui PUMP dapat meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat serta meningkatkan pengembangan wirausaha kelautan dan perikanan di pedesaan. Pengembangan kerjasama dengan perbankan dalam rangka penyediaan modal usaha bagi nelayan dan pembudidaya ikan serta kerjasama dengan swasta dan negara sahabat.

Sementara target kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan terhadap PDB Nasional tanpa migas tahun 2011 sebesar 3,5 persen antara lain seperti produksi perikanan sebesar 12,26 juta ton, yang terdiri dari perikanan tangkap 5,41 juta ton dan perikanan budidaya 6,85 juta ton.

Nilai ekspor hasil perikanan sebesar USD 3,2 miliar, konsumsi ikan sebesar 31,64 kg per kapita, jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang bersertifikat sebanyak 449 unit. ■

Mengubah Bencana Menjadi Berkah di Kali Code

Meletusnya Merapi tidak hanya menimbulkan kerusakan tetapi ada berkah di balik dahsyatnya letusan gunung di utara Yogyakarta itu.

Oleh: Utoyo Harjito

Letusan gunung Merapi memang telah menimbulkan banyak cerita bagi masyarakat Sleman dan Yogyakarta. Pasir di Kali Code, contohnya, bila dibiarkan itu bisa jadi bencana karena menimbulkan banjir. Tapi, beberapa waktu lalu Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X, masyarakat dan sejumlah perusahaan berusaha "mengubah" potensi bencana itu di dari Kali Code.

"Mengambil pasir di Kali Code menjadi sangat penting saat ini. Sebab, kalau pasir itu tidak diambil, akan makin luas menggenangi rumah-rumah penduduk," tegas Sultan Hamengku Buwono X saat memimpin gotong-royong pengerukan pasir Kali Code di halaman rumah susun Jogoyudan, beberapa waktu lalu.

Gotong royong pengerukan pasir Merapi di Kali Code ini disponsori oleh sebuah stasiun televisi dan operator telepon seluler. Warga memperoleh bantuan tiga buah mesin penyedot pasir, 900 serok pasir, 100 buah pacul, 50 buah sekop, 7.200 karung plastik, 20 alat pencetak batako dan 40 alat pencetak paving blok. Dengan bantuan alat-alat tersebut diharapkan pasir yang dikeruk dari aliran Kali Code bisa dimanfaatkan menjadi batako dan paving blok. Itu bisa jadi berkah tersendiri bagi masyarakat sekitar Kali Code.

FOTO: TNP2K/SUTIKNO

Sultan meminta warga mau memanfaatkan bantuan itu. "Alat-alat sudah disiapkan. Tinggal menggunakannya," kata dia. Sultan juga mengingatkan agar warga tak perlu takut seperti warga di lereng Merapi yang takut membersihkan kayu pinus yang hanyut. Alasan warga, "pesta" Merapi belum usai.

Dalam acara tersebut, PT Excelcomindo Axiata (XL), menyerahkan tak kurang Rp 3,5 miliar dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu korban bencana Merapi.

"Untuk tahun ini keseluruhan dana CSR mencapai Rp 15 miliar, 25 persennya khusus untuk di Yogyakarta saja," ujar Presiden Direktur PT Excelcomindo Axiata Hasnul Suhaimi di sela-sela penyerahan peralatan pengeruk pasir Merapi di daerah rumah susun Kali Code Yogyakarta, Ahad (12/12). Dia juga mengatakan XL juga akan menyerahkan dana serupa di Jawa Tengah dan beberapa daerah lain yang mengalami bencana.

XL mempunyai dana CSR rata-rata Rp 10 miliar per tahunnya. "Tetapi. Karena bencana tahun ini cukup banyak, kami tambah 50 persen jadi Rp 15 miliar," ujar Hasnul.

Bersama Pundi Amal SCTV mereka melakukan pengerukan pasir Kali Code sepanjang lima kilometer. Mereka juga menjanjikan akan memberikan tambahan Handy Talkie kepada warga.

Beruntung dalam bencana ini XL tak banyak mengalami kerugian. Untuk bencana Merapi ini, kata Hasnul, satu menara BTS di Desa Glagaharjo hancur lumat oleh awan panas Merapi. "Tapi yang lain aman," ujar Hasnul.

Siapkan Bantuan Bencana

Selain itu pihak XL Central Region (Jabar, Jateng dan DIY) akan menyisipkan program sekolah bencana dalam program corporate social responsibility (CSR) mereka. Program ini diharapkan bisa memberi pengetahuan tanggap bencana bagi anak-anak sekolah sehingga mereka bisa menjadi garda bencana.

"Program CSR kita adalah pendidikan. Tidak hanya memberikan bantuan fisik, kita juga berikan edukasi. Tahun 2010 tentang internet sehat, dan rencananya tahun ini akan ditambah dengan sekolah bencana," ujar External Affairs XL Central Region, Indra Ardiyanto.

Masih menurut Indra, dalam program tersebut XL akan melibatkan pihak-pihak yang terkait dan kompeten dalam hal tanggap bencana. Materi utama yang akan disampaikan dalam program tersebut adalah tentang disaster management.

Hal ini dianggap penting mengingat setiap bencana terjadi, anak-anak seringkali menjadi beban. Dengan adanya edukasi tentang tanggap bencana maka diharapkan anak-anak akan bisa mandiri atau mungkin bisa menyelamatkan orang lain saat bencana itu terjadi.

"Targetnya anak SMP atau SMA. Diharapkan setelah mereka mendapatkan disaster management, mereka bisa getok tular ke orang tuanya ataupun ke lingkungan sekitanya," papar pria yang akrab dipanggil Indra Prada ini.

Khusus pendidikan, XL mengalokasikan dana sebesar Rp 10,5 miliar. Angka ini sekitar 70 persen dari total dana CSR XL yang mencapai Rp 15 miliar di tahun 2010.

"Untuk angkanya berapa tahun ini, kita belum tahu. Tapi yang jelas kita tetap fokus untuk meningkatkan mutu pendidikan. Khususnya di daerah rawan bencana," jelasnya.

Sebelumnya, XL Central Region dalam program Komputer Untuk Sekolah (KUS) telah menyalurkan 80 unit komputer bagi sekolah-sekolah di wilayah Central Region.

Disinggung berapa banyak sekolah yang akan dijadikan sekolah bencana, Indra mengaku belum ada kepastian tentang jumlahnya. Namun wilayah Jateng menjadi prioritas utama dari program ini.

"Pengalaman *kemaren*, kita ingin dimulai di wilayah Jateng. Disamping kita telah melakukan survey, program ini bisa berkesinambungan dengan program bencana Merapi yang beberapa waktu lalu kita lakukan," tandasnya. ■

FOTO: TNP2K/SUTIKNO

Pemanfaatan Dana PKBL Diperluas

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyiapkan formulasi penyesuaian peraturan menteri menyangkut penggunaan dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) untuk memperluas jangkauan pemanfaatan anggaran tesebut.

Oleh: B. Wilson Lumi

Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan program yang tengah disiapkan sebagai kelompok yang akan memperoleh penyaluran dana PKBL dari kementerian ini, yakni bidang olahraga dan seni budaya.

"Perlu penyesuaian peraturan mengenai PKBL, agar bidang olahraga dan seni budaya masuk sebagai salah satu prioritas yangmemperoleh penyaluran anggaran ini," ujar Mentri saat acara Sinergi antara BUMN melalui PKBL dalam Pendanaan untuk Petani Tebu, belum lama ini.

Menurut dia, keikutsertaan BUMN menyisihkan sekitar 1%-2% dari laba bersih untuk program corporate social responsibility (CSR) ini harus mampu menjangkau seluruh bidang. Sejak 1989 hingga akhir 2009, dana PKBL telah tersalurkan mencapai Rp9,69 triliun yang terserap di 33 provinsi dan tersebar lebih dari 650.000 mitra binaan. "Kami menargetkan penyaluran PKBL setiap tahun akan mencapai Rp 2 triliun," tuturnya.

FOTO: RAHMAD

Menteri BUMN Mustafa Abubakar

Optimalisasi BUMN dan sinergi BUMN diharapkan dapat meningkatkan manfaat dari program PKBL ke lebih banyak lagi mitra binaan. "Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir jumlah PKBL yang terkumpul mencapai Rp 6,38 triliun," tambahnya.

Sebelumnya pada acara Penandatanganan Kerja Sama Sinergi PKBL di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, beberapa waktu lalu, Menteri menjelaskan, kementerian BUMN akan mengupayakan agar dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari seluruh BUMN mampu mencapai hingga Rp 10 triliun hingga 2014. Setiap tahun penyaluran ditargetkan naik Rp 2 trilun. "Kami mencatat dalam lima tahun terakhir hingga 2009, dana PKBL yang sudah tersalurkan mencapai Rp 6,38 triliun," ujar Menteri.

Khusus tahun 2010, berdasarkan prognosa, PKBL yang telah tersalurkan mencapai Rp1,97 triliun. "Pendistribusian PKBL pada 2009 kepada sebanyak 650 ribu lebih UKM atau meningkat dari posisi 370 ribu pada 2004," katanya.

Memang untuk meningkatkan penyaluran dana PKBL, Kementerian BUMN harus melakukan sinergi antar-BUMN. Dan, jumlah total penyaluran dana PKBL lewat sinergi ini adalah Rp 385 miliar. Sinergi yang telah ditandatangani tersebut antara lain PT Sarinah sebagai pembina dan penyalur dana PKBL dengan enam BUMN yakni PT Jasa Marga, PT Bio Farma, PT PANN, PT ASEI, PT JIEP, dan Perum PNRI. Dana yang disalurkan dari enam BUMN kepada mitra binaan Sarinah senilai Rp 13 miliar.

Selain itu, antara PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X sebagai penyalur dana PKBL dengan PT Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Jasa Raharja, PT Pelindo II, PT Taspen, PT Asuransi Ekspor Indonesia dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dana yang disalurkan sebesar Rp347 miliar.

Sementara itu, PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) sebagai penyalur

dana PKBL dengan PT Bukit Asam Tbk. Dana yang disalurkan sebesar Rp15 miliar. PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN IX) sebagai penyalur dana PKBL dengan PT Semen Baturaja dengan dana yang disalurkan sebesar Rp10 miliar.

Mustafa Abubakar, memaparkan, dengan makin pesatnya sektor dunia usaha, termasuk BUMN, tuntutan agar BUMN berperan lebih aktif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. "Hal ini tentunya akan terlihat nyata apabila program yang dilakukan BUMN menyentuh sektor yang banyak menyerap tenaga kerja (padat karya), antara lain pertanian/perkebunan dan kerajinan rakyat," kata dia.

PT Sarinah sebagai BUMN yang bergerak di bisnis ritel akan menggunakan dana PKBL untuk membina para perajin dan pengusaha kecil khususnya batik dan kerajinan. Sedangkan PTPN X, PTPN VII, PTPN XI akan menyalurkan dana yang diterimanya kepada petani tebu di wilayah kerjanya. Dalam sinergi ini, PT Sarinah berharap perannya sebagai The Indonesian Emporium dapat berjalan dengan baik. ■

FOTO: ISTIMEWA

Gedung PT Sarinah

Pelatihan UMKM Merangsang Pertumbuhan Ekonomi

Usaha Mikro Kecil Menengah telah teruji kemampuannya dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat pada saat terjadi krisis ekonomi beberapa tahun lalu. Untuk itu pertumbuhannya harus terus ditingkatkan.

Oleh: Utoyo Harjito

Tidak bisa dipungkiri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam menopang perekonomian bangsa. Sudah selayaknya para pelaku UMKM lebih dirangsang agar semakin maju. Dorongan berbagai pihak baik dari pemerintah dan swasta terus dilakukan untuk memajukan usaha mikro, kecil dan menengah.

Salah satu pihak swasta yang ikut melakukan kegiatan untuk mendorong UMKM adalah, Bank Danamon dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan konsultasi bisnis bagi pelaku usaha mikro kecil yang menjadi nasabahnya untuk mendorong pengembangan bisnis dan peningkatan kapasitas pelaku usaha tersebut.

Self Employed Mass Market Head Bank Danamon Minhari Handikusuma mengatakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas nasabah usaha kecil dan mikro diperlukan pelatihan untuk membantu mengembangkan kegiatan usaha.

"Pelatihan dalam bentuk layanan konsultasi bisnis bagi nasabah dalam program *Customer Development* yang dilaksanakan di Balikpapan, Bandung, Cirebon, Jakarta, Makassar, Malang, Medan, Palembang, Pekanbaru, Semarang, Solo dan Surabaya," jelasnya.

Upaya diperlukan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk membantu kemampuan pengelolaan bisnis secara lebih baik sehingga bisa terus meningkatkan modal kerja dan investasi.

Dengan begitu, nasabah bisa meningkatkan pembiayaan mikro dari Danamon Simpan Pinjaman untuk membantu pengembangan usaha khususnya para pelaku usaha mikro dan kecil."

Bank Danamon telah mengembangkan layanan permodalan bagi usaha mikro dan kecil. Dalam 4 tahun telah dibuka 1.089 jaringan kantor untuk mendekatkan pelayanan pembiayaan sehingga pengusaha kecil semakin mudah memeroleh akses.

Tahun depan, jaringan pembiayaan usaha mikro dan kecil itu akan ditambah lagi sebanyak 153 kantor dengan membidik pelaku usaha perdagangan yang berada di lingkungan pasar tradisional. Ke depan, akan dikembangkan pembiayaan agribisnis dan pembiayaan produk unggulan di setiap daerah.

Saat ini, terdapat sekitar 500.000 usaha mikro dan kecil yang telah memperoleh pembiayaan dengan plafon kredit antara Rp5 juta sampai Rp500 juta.

"Pada September 2010, kredit usaha mikro dan kecil yang disalurkan mencapai lebih dari Rp15 triliun meningkat dibandingkan posisi Desember 2009 yang tercatat Rp12,3 triliun," tuturnya.

Sementara itu, Bank Mandiri selama 2011 telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp2,1 triliun atau 113,82 persen dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp1,84 triliun.

Direktur Commercial & Business Banking Bank Mandiri Sunarso di Jakarta, Selasa mengatakan secara total, penyaluran KUR Bank Mandiri sejak 2007 mencapai Rp3,61 triliun untuk lebih dari 74 ribu debitur.

"Sebagian besar penyaluran KUR terserap ke sektor pertanian dan peternakan dengan porsi kredit mencapai 50,34 persen bagi lebih dari 49 ribu debitur. Sebesar 38,96 persen disalurkan ke sektor perdagangan ke-

pada lebih dari 22 ribu debitur, selebihnya disalurkan ke sektor lain," katanya.

Penyaluran untuk sektor pertanian dan peternakan lebih dominan karena kuatnya komitmen Bank Mandiri untuk menyalurkan KUR ke sektor hulu agar dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga dapat mendorong perekonomian masyarakat, serta upaya menjangkau pelaku UMKM di daerah yang tidak terjangkau Bank.

Penyaluran kredit kepada nasabah KUR Mikro dilayani lebih dari 1.000 jaringan kantor sedangkan penyaluran KUR ritel dilayani oleh 177 jaringan kantor.

"Kami ingin KUR benar-benar dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, untuk itu Bank Mandiri memperbanyak penyalurannya ke masyarakat di perdesaan, harapan kami adalah tumbuhnya kegiatan ekonomi," kata Sunarso.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program yang bertujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah dan koperasi yang *feasible*, namun belum bankable.

Pemerintah merevitalisasi KUR untuk mendorong akselerasi penyaluran kredit tersebut melalui peningkatan plafon KUR mikro yang semula Rp5 juta menjadi Rp20 juta, meningkatkan penjaminan Pemerintah untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan serta industri kecil yang semula 70 persen menjadi 80 persen.

Selain itu memberikan skema KUR untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan penjaminan Pemerintah sebesar 80 persen, meningkatkan plafon KUR untuk program linkage executing (penyaluran KUR tidak langsung) dari semula Rp1 miliar menjadi Rp2 miliar dan memberikan jangka waktu kredit investasi untuk perkebunan tanaman keras langsung 13 tahun.

Untuk penyaluran dengan pola individual, Bank Mandiri membiayai UMKM dengan potensi limit Rp20 juta per nasabah untuk KUR Mikro dan di atas Rp20 juta sampai dengan Rp500 juta untuk KUR ritel.

Strategi yang digunakan di antaranya melalui pola aliansi dengan pembiayaan kepada supplier atau sub distributor usaha mikro, usaha kecil, maupun koperasi yang merupakan rekanan/rantai usaha dari pengusaha besar nasabah segmen commercial dan coporate Bank Mandiri.

Sunarso juga mengatakan, terdapat tiga hal terpenting dalam upaya penyaluran KUR. *Pertama*, strategi pencapaiannya diintegrasikan dengan strategi Bank Mandiri dalam upaya pengembangan UMKM secara keseluruhan. *Kedua*, membangun semangat kewirausahaan di kalangan pelaku UMKM penerima KUR. *Ketiga*, edukasi kepada penerima KUR agar mampu mengelola usahanya dengan "governance" yang baik dan bertanggung jawab.

"Hasilnya, Bank Mandiri berhasil menjaga kualitas KUR tetap baik. Angka *non performing loan* (NPL) hanya 0,68 persen per 31 Desember 2010, atau mengalami perbaikan jika dibandingkan NPL KUR tahun 2009 sebesar 1,71 persen," ujar Sunarso.

Bank Mandiri berharap peran aktif seluruh stakeholder dalam membina dan mempersiapkan pelaku usaha yang belum bankable dapat ditingkatkan untuk lebih mengoptimalkan penyaluran KUR, dalam upaya membangun UMKM. ■

FOTO: UTOYO

Membangun Pariwisata RAJA AMPAT

Keindahan alam Kabupaten Raja Ampat, yang terletak di wilayah Provinsi Papua Barat tak perlu diragukan lagi. Terutama yang berkaitan dengan lautan, hampir semuanya memiliki potensi pariwisata.

Oleh: Wilson B Lumi

Pantai yang berpasir putih dan keindahan alam bawah laut kabupaten Raja Ampat sungguh menakjubkan. Selain dihuni oleh ribuan spesies ikan, wilayah ini juga terkenal dengan terumbu karangnya. Dan semua keaneka ragaman hayati itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan baik asing maupun lokal. Meski demikian untuk menjadikan pariwisata sebagai sebuah industri sesungguhnya tidak cuma bermodalkan keindahan alam. Diperlukan juga faktor pendukung lain dari berbagai sektor. Misalnya sektor transportasi dan infrastruktur yang berfungsi untuk menjangkau daerah wisata tersebut.

"Membangun industri pariwisata Raja Ampat harus simultan dan menjadi tanggungjawab semua sektor," kata Yusdi Lamatenggo, S.Pi,M.Si, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, kepada PROGRES di Kota Waisai, beberapa waktu lalu.

Embusan semilir angin laut di pagi selasa bulan November 2010 terasa begitu menyegarkan. Sebuah dermaga kecil di desa wisata Saundarek masih terlihat sepi dari lalu lalang pengunjung. Dan PROGRES dengan leluasa menikmati keindahan laut desa pariwisata di Kabupaten Raja Ampat itu, tanpa ada gangguan. Bagai menikmati indahnya sempalan surga yang tercecer dibumi. Sangat indah menyenangkan.

Sejak diproklamirkan sebagai sebuah kabupaten baru, Raja Ampat tiba-tiba saja terkenal diselebar jagad. Namanya memenuhi dunia maya dalam situs-situs kelas internasional. Dan dibaca di berbagai belahan dunia lain oleh kalangan penikmat wisata. Contohnya saja Pangeran Alber II dari Monaco, jauh-jauh datang untuk menikmati keindahan alam Raja Ampat. Belum lagi turis asing dari kebangsaan lain. Semua itu membuat Raja Ampat menjadi mendunia. Raja Ampat tidak lagi cuma milik Indonesia, tapi sudah menjadi milik dunia. Untuk itu segala yang berkaitan dengan pelestarian alam harus benar-benar dijaga ekosistemnya dari berbagai kerusakan. Karena itulah modal utama yang menjadi daya tarik para wisatawan mancanegara datang ke Raja Ampat.

Drs. Marcus Wanma, Bupati Kabupaten Raja Ampat

Pemerintah lewat Kementerian Pariwisata dalam Kebijakan Umum Tahun 2010-2014 yang dituangkan dalam rencana strategis menetapkan untuk membangun destinasi pariwisata kabupaten Raja Ampat bersama 29 kabupaten lainnya. Pemerintah berupaya membangun dunia pariwisata agar bisa menjadi salah satu sumber pendapatan negara.

Akses Pariwisata

Dilihat dari kondisinya, tanah air Indonesia memang sangat berpotensi untuk pengembangan pariwisata kelas dunia. Karena memiliki alam yang indah. Baik di darat maupun di lautan. Namun demikian, dari data indeks daya saing pariwisata yang dikeluarkan sebuah lembaga LSM Internasional, Indonesia masih berada dalam urutan ke 88 dari 134 negara yang memiliki tempat-tempat wisata di dunia. Jauh dibawah Negara Malaysia dan Singapore yang hanya memiliki secuil tempat wisata. Hal ini tentu saja membuat kita mawas diri. Dengan garis pantai yang sangat panjang dan terumbu karang terluas di dunia ditambah sejuta

keindahan alam lainnya ternyata Indonesia masih tertinggal jauh dalam hal menarik wisatawan.

Menyikapi hal itu pemerintah kabupaten Raja Ampat lewat dinas pariwisata telah menetapkan 8 langkah upaya peningkatan pembangunan pariwisata. Yaitu, aksesibilitas, aksesibilitas, aksesibilitas, infrastruktur, produk wisata, pemberdayaan masyarakat, investasi wisata, promosi wisata.

"Membangun pariwisata di Raja Ampat harus dimulai dengan pembangunan aksesibilitas", kata Yusdi.

Betapapun indahnya alam Raja Ampat tetapi tanpa adanya akses menuju tempat wisata, mustahil diminati orang. Karena pada intinya pariwisata adalah pergerakan orang dari satu tempat ketempat lainnya. Dan kemudahan untuk menjangkau daerah-daerah lokasi wisata tersebut menjadi sangat penting. Untuk itu sektor transportasi memegang peran terdepan bagi pengembangan dunia pariwisata. "Aksesibilitas merupakan roh nya pariwisata," jelas Yusdi.

FOTO: LINA

Yusdi Lamatenggo, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat

Disisi lain, dia mencontohkan, mengapa pariwisata negara-negara tetangga yang memiliki secuil tempat wisata itu menjadi sangat ramai dikunjungi wisatawan. Karena adanya kemudahan yang dibangun untuk menjangkau daerah-daerah wisata tersebut. Ditambah lagi dengan kemurahan biaya yang dikeluarkan setiap wisatawan. Bila dibandingkan biaya transportasi yang dikeluarkan untuk ke Raja Ampat jauh lebih mahal. "Orang Jakarta, kata Yusdi, lebih gampang untuk wisata ke Singapore atau ke Malaysia dibandingkan untuk ke Indonesia Timur khususnya ke Raja Ampat, karena sarana transportasinya lebih mudah dan murah."

Selain itu faktor infrastuktur pariwisata juga sangat penting. Misalnya penyediaan hotel,

FOTO: ISTIMEWA

FOTO: ISTIMEWA

restoran, air bersih, jalan, listrik, telekomunikasi, perbankan harus segera dibangun oleh pemerintah kabupaten Raja Ampat. Sementera ini untuk penunjang infrastruktur tersebut masih di bantu oleh kabupaten Sorong. Sedangkan di Raja Ampat baru ada 5 resort dan 38 kapal wisata. Kedepan pemerintah kabupaten Raja Ampat akan segera menambah berbagai infrastruktur lainnya untuk menunjang pariwisata.

Festival Bahari

Dalam penelitian pakar kelautan dunia dinyatakan bahwa Kabupaten Raja Ampat memiliki sumber daya alam laut yang kaya dan berlimpah. Ribuan species ikan dapat ditemukan diperairan lautnya. Juga terumbu karang yang mencapai 75% dari jenis terumbu karang yang ada didunia. Semua itu menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara yang jumlahnya diperkirakan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Selain memiliki sumberdaya alam yang melimpah sebenarnya Raja Ampat juga memiliki kekayaan budaya daerah yang sangat khas dan tak kalah menariknya. Untuk itu pada hari Ulangtahun yang lalu pemerintah kabupaten Raja Ampat telah menyelenggarakan sebuah festival yang diberinama Festival Bahari. Festival itu jelas untuk memperkenalkan sisi lain dari kekayaan budaya yang ada di Raja Ampat.

"Festival ini menjadi ajang untuk mengangkat dan memperkenalkan potensi seni dan budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Raja Ampat," ujar Bupati Kabupaten Raja Ampat, Drs. Marcus Wanma, M.Si.

Beragam atraksi budaya dipentaskan dalam acara itu. Ribuan masyarakat Raja Ampat yang tergabung dalam berbagai kelompok mempertontonkan berbagai seni tarinya. Ibukota Waisai pun menjadi gegap–gempita oleh pesta masyarakat Raja Ampat. Ribuan pengunjung membanjiri pantai Waisai Tercinta (WTC), sebagai pusat pelaksanaan festival. Wisatawan domestik dan wisatawan asing berbaur dengan penuh sukacita. Tawa lepas dan tepuk tangan membahana ketika berbagai atraksi seni tari adat Raja Ampat ditampilkan. Tak hanya masyarakat Raja Ampat yang mempersembahkan atraksi kesenian

mereka. Beberapa kabupaten tetangga juga turut menyemarakan festival Bahari itu. Mereka menampilkan seni budaya dan tari lokal masing-masing.

Ibarat seorang gadis, perkembangan Raja Ampat tengah bersolek untuk memikat para pria. Begitulah Bupati Raja Ampat Marcus Wanma menggambarkan kemajuan Raja Ampat yang semakin tahun semakin berbenah mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Pada ulang tahun ketujuh ini, Pemda Raja Ampat menggelar festival bahari itu selama tujuh hari.

Berbagai tontotan andalan dipersembahkan kepada wisatawan yang hadir. Mulai dari atraksi seni tari adat, lomba foto bawah laut, lomba perahu dayung, orientasi bawah air, olahraga pantai seperti voli, parade alat transportasi tradisional khas Raja Ampat yang hampir punah, seni ukir dan lukis dari berbagai bahan baku tradisional dan alat tangkap ikan, menghadirkan ragam kuliner dari berbagai daerah di Raja Ampat, seperti mengonsumsi buah mangrove, dan kuliner khas makanan Raja Ampat lainnya.

Selain itu, festival bahari juga merupakan ajang untuk meningkatkan kepariwisataan Raja Ampat. Berbagai fasilitas kepariwisataan termasuk akses menuju desa-desa wisata telah dibangun oleh pemerintah Raja Ampat.

Festival Bahari 2010 yang dibuka Staf Ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata bidang Pranata Sosial, Drs. Surya Yuga, ini dihadiri kurang lebih seribu wisatawan lokal maupun internasional. Dalam pembukaan acara itu, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Marcus Wanma yang terus gigih membangun, terutama infrastruktur yang mendukung perekonomian daerah dan sektor pariwisata.

"Festival Bahari Raja Ampat 2010 ini digelar agar Kabupaten Raja Ampat semakin dikenal luas dan semakin diminati sebagai tujuan wisata bahari dunia. Oleh karena itu, rencananya festival Bahari Raja Ampat ini akan diagendakan menjadi kegiatan tahunan," tutur Marcus optimis. ■

FOTO: ISTIMEWA

Harga Beras Bikin Was-was

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menurunkan harga beras dan konsumsi beras nasional. Dikhawatirkan bisa berdampak pada jumlah angka kemiskinan apabila harga beras naik.

Oleh: Eko Caroko

Awal tahun ini para ibu rumah tangga mengeluhkan naiknya berbagai komoditi kebutuhan rumah tangga. Mulai dari harga cabe, bumbu dapur hingga beras yang merupakan bahan makanan pokok sebagian besar penduduk di negeri ini. Khusus untuk beras kenaikan harganya sudah mulai dirasakan sejak pertengahan 2010. Kenaikan harga beras itu harus diwaspadai.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) selama 2010 lalu angka inflasi mencapai 6,96%. Harga beras menjadi penyumbang terbesar inflasi 2010, yakni sebesar 1,29%. Untuk diketahui tahun lalu rata-rata harga beras mencapai Rp 6.513 per kilogram, bandingkan dengan tahun sebelumnya (2009) yang hanya Rp 5.712. berdasarkan data yang ada tren kenaikan harga beras ini sudah mulai terjadi sejak enam tahun yang lalu *(lihat tabel).*

Pemerintah tampaknya sangat serius memantau harga beras, karena diyakini akan sangat berpengaruh terhadap upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Menurut Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, jika harga bahan pangan terus meningkat, maka jumlah masyarakat miskin bisa saja naik.

Dalam dokumen bahan *Re-treat* Pangan, terungkap pemerintah khawatir kenaikan harga pangan ini bakal mengerek angka kemiskinan. Ini disebabkan karena masyarakat miskin sangat terpengaruh oleh kenaikan harga bahan pangan, sebab dua pertiga dari konsumsi mereka dihabiskan untuk membeli bahan pangan.

Untuk mengatasi lonjakan harga beras pemerintah menurut Agung Laksono pemerintah akan melakukan percepatan realisasi sejumlah program penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah akan mengoptimalkan program beras miskin, jaminan kesehatan masyarakat, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat. Dia mengatakan pemerintah akan berupaya mengurangi beban rakyat yang sudah besar karena kenaikan harga bahan pangan. "Jamkesmas, raskin dan program lainnya akan diintensifkan, yang penting jangan tambah beban rakyat, harus dikurangi," katanya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir memprediksi harga beras tahun ini bisa kembali melonjak. Perkiraan itu berdasarkan asumsi produksi beras nasional yang turun sebesar 5%, akibat anomali iklim. "Dengan produksi turun jelas mempengaruhi harga beras nantinya. Kenaikan harga beras tidak akan hanya terjadi di Indonesia tapi juga di

Antre beras raskin

FOTO: ISTIMEWA

Perkembangan Harga Beras (2005-2009)

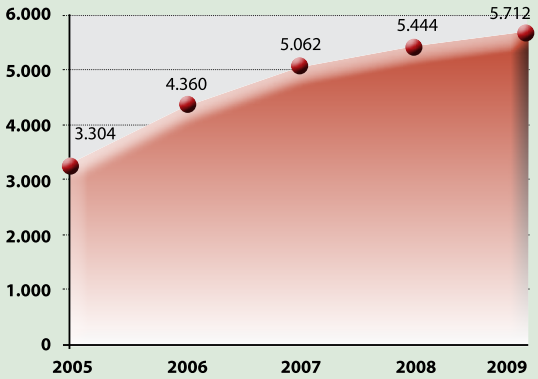

Perkembangan Harga Beras (2010)

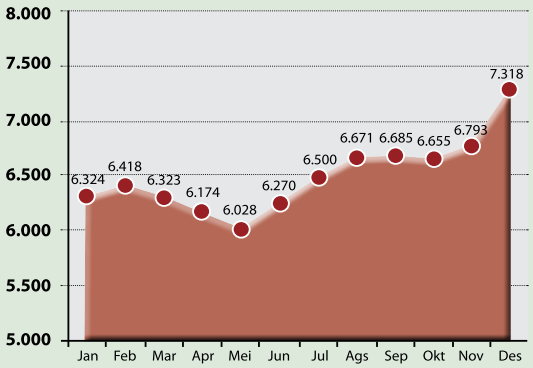

Sumber : Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan

luar negeri," katanya. "Ini kalau merujuk pada pernyataan FAO (Food and Agriculture Organization) yang mengatakan akibat perubahan iklim akan terjadi penurunan tanaman serelia atau biji-bijian termasuk padi," ujarnya. Senada dengan Winarno, Rusman Heriawan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyitir ramalan analis internasional yang mengatakan harga beras akan melonjak hingga dua kali lipat pada tahun depan. Hal ini melanjutkan tren kenaikan beras yang terjadi sepanjang tahun lalu akibat perubahan iklim yang merubah pola panen.

Sedangkan mantan Menteri Pertanian, Bungaran Saragih berpendapat sudah saatnya pemerintah memiliki target yang jelas untuk mengurangi konsumsi beras nasional, yakni dari dari 139 kg/kapita/tahun menjadi 60 kg/kapita/tahun tercapai. Penurunan konsumi beras bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Banyak negara sudah berhasil melakukannya, seperti Jepang dan Thailand. Upaya penurunan konsumsi beras itu dilakukan dengan mengupayakan pangan pengganti beras seperti umbi-umbian, sagu, atau bahan pangan lokal non beras lainnya. Jika konsumsi beras dapat diturunkan maka pemerintah tidak perlu melakukan impor. Selain itu, tambahnya, jika konsumsi dapat ditekan maka areal tanaman pangan yang selama ini digunakan untuk tanaman padi, dapat digunakan untuk tanaman lainnya yang bernilai ekonomis.

Bungaran mengingatkan pada 2011 ini ancaman perubahan iklim semakin terasa. Hal ini berdampak pada ketahanan pangan global. "Nantinya banyak negara produsen pangan yang menahan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri," katanya. Terbatasnya pasokan, tambahnya, akan berpengaruh pada kenaikan harga pangan dunia yang dapat mengganggu stabilitas sosial politik di dalam negeri.

Pengamat ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latief Adam menambahkan

gejolak harga pangan dunia mesti disikapi pemerintah. "Permintaan bahan pangan di Indonesia sangat tinggi, 70% dari pendapatan digunakan untuk pangan," ujarnya. Dia mengkhawatirkan jika pemerintah tidak serius dengan masalah ini maka krisis pangan dapat terulang kembali.

Menanggapi polemik tersebut, Menteri Pertanian Suswono menjelaskan pemerintah berupaya keras menurunkan konsumsi beras nasional. "Secara khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar dilakukan substitusi pangan nasional, yang dicantumkan pada Perpres No. 22/2009. Perpres itu bertujuan agar ada kebijakan lintas sektoral yang mendukung upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal," ujarnya.

Mentan menyatakan kementerian sudah sejak lama melakukan kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan di dalam negeri. Namun, hasilnya belum maksimal. Dia menyatakan mengubah jenis makanan yang konsumsi pada dasarnya terkait pada aspek psikologis dibandingkan medis. Mentan mencontohkan kebiasaan masyarakat yang mengkonsumsi nasi menimbulkan aspek psikologis yang mendalam. "Jadi meski sudah makan jagung lima bonggol, tetap saja dianggap belum makan, karena belum ketemu nasi," katanya.

Padahal, katanya, dari sisi kesehatan banyak komoditas substitusi nonberas yang kandungan karbohidrat dan proteinnya lebih baik daripada beras. Komoditas nonberas itu, antara lain sagu, jagung, singkong, sogum, dan ganyong. Dalam hal ini pemerintah menargetkan terjadi penurunan konsumsi beras mencapai 1,5% per tahun. ■

FOTO: ISTIMEWA

Singkong dan jagung sebagai makanan pilihan alternatif.

FOTO: UTOYO H

Persiapkan Tenaga Didik untuk Masyarakat Terpencil

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan mutlak dalam menjawab tantangan di era global mendatang, terlebih untuk daerah seperti Kabupaten Aru yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang.

Oleh: Utoyo Harjito

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru melakukan kerja sama bidang pendidikan dengan mengirimkan mahasiswa ke Universitas Negeri Malang (UNM), Jawa Timur. Mereka di didiki dan dipersiapkan untuk menjadi tenaga guru di masa mendatang. Hal ini untuk meng-antisipasi kekurangan tenaga pendidik di Kabupaten Aru.

"Program itu sudah berjalan sejak tahun 2007 dengan jatah untuk tahun ini sedang diselek-si 100 calon mahasiswa yang akan kuliah di UNM," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru, Cory Galandjindjinai, di Dobo.

Selama ini, Pemkab Aru telah mengirimkan 225 mahasiswa untuk kuliah di Malang dan 25 orang di antaranya akan di-wisuda pada September 2010, ke-mudian mereka kembali ke Aru untuk mengabdi sebagai guru.

Dari 100 calon mahasiswa yang akan dikirim, 60 orang di antaranya mengikuti program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), 20 orang mengikuti program studi Bahasa Inggris, dan sisanya mengikuti program pendidikan untuk bidang studi Bahasa Indonesia.

Pemkab Kepulauan Aru, setiap tahun menganggarkan Rp4 juta dari APBD setempat

untuk membiayai mahasiswa yang melakukan studi di Universitas Negeri Malang, khususnya Fakultas Kegurusan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

"Kepedulian Pemkab terhadap dunia pendidikan sangat baik sehingga diharapkan mereka yang lulus seleksi nanti dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti ini," kata Cory.

Tujuan kerja sama itu untuk menanggulangi masalah kebutuhan tenaga guru yang masih sangat terbatas di daerah itu sehingga penyebarannya juga tidak merata.

Sampai saat ini, masih ada sekolah di tingkat kecamatan dan pedesaan yang hanya dilayani satu atau dua orang guru dan berbeda jauh dengan jumlah guru di tingkat kabupaten yang relatif lebih berimbang dengan jumlah siswa di setiap sekolah.

Hal ini ditambahkan juga oleh Ketua DPRD Kepulauan Aru, Jemry Salay yang menyatakan, bidang pendidikan perlu didorong karena Kepulauan Aru membutuhkan kualitas sumber daya manusia untuk mengoptimalkan kualitas pemerintahan, percepatan pembangunan dan optimalisasi pelayanan sosial.

"Saya mendukung terobosan Bupati Tengko yang memberikan beasiswa kepada ratusan mahasiswa maupun PNS menekuni program sarjana strata (S1) maupun S2 di sejumlah perguruan tinggi di pulau Jawa. Begitu pun membangun perkampungan pelajar berkapasitas 2.000 siswa," ujar Jemry Salay.

"Bupati Tengko yang memimpin Kepulauan Aru untuk periode kedua sudah memahami karakteristik wilayah tersebut dengan 117 desa dan

FOTO: UTOYO

Cory Galandjindjinai, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru.

dua kelurahan sehingga bidang pendidikan dan kesehatan harus didorong agar menjawab misi pemekaran dari Maluku Tenggara pada 2004," tambah Jemry.

Sementara itu di tempat terpisah Pembantu Rektor I UM, Dr. H. Kusmintardjo, M.Pd, menyambut baik para mahasiswa baru yang telah berhasil lolos seleksi pemerintah daerah untuk melanjutkan studi di UNM tersebut.

Menurut Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru, Nurtjei. DJ. Guyen, S.Sos, "tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), karena kurangnya tenaga pendidik di daerah Kepulauan Aru.

Mahasiswa yang telah lolos dalam seleksi nantinya bila telah selesai menempuh pendidikan harus kembali ke daerah untuk mengajar. "Selain itu Pemerintah Daerah juga langsung memberikan prioritas khusus untuk nantinya mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)," lanjutnya. ■

FOTO: UTOYO H

Pelayanan Publik harus Cepat dan Merata sampai ke Pelosok

Program pembangunan yang sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci untuk mendorong kemajuan dalam memberikan pelayanan yang cepat sampai ke daerah pelosok.

FOTO: UTOYO

Oleh: Utoyo Harjito

Luasnya bumi nusantara ini menuntut perhatian yang besar, dan hal ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun tidak jarang justru peran pemerintah daerah dinilai lebih strategis, selain memahami benar kebutuhan masyarakatnya, diharapkan pemerintah daerah mampu dengan cepat mengambil kebijakan yang cocok untuk masyarakatnya sampai ke pelosok. Untuk itu diperlukan pemahaman tentang kearifan lokal dalam mengambil sebuah kebijakan.

Karena tujuannya akhirnya adalah melayani semua kebutuhan masyarakat dengan baik. Tentunya saja kebijakan daerah harus sesuai dengan kerangka kebijakan pemerintah pusat agar terjadi sinergitas.

Pemerintah Kabupaten Aru menegaskan hal itu melalui Bupati Kepulauan Aru, Teddy Tengko, SH, MHum, untuk mempercepat pelayanan kepada publik dari perkotaan sampai ke pelosok.

Letak geografis Kepulauan Aru sebagai daerah yang baru dimekarkan, dan terdiri dari ratusan pulau sangatlah membutuhkan perencanaan yang matang dan tepat untuk membangun dan menjawab setiap kebutuhan masyarakat. “Setelah dilakukan pemekaran beberapa tahun lalu daerah ini telah mengalami kemajuan yang pesat. Untuk itu kita perlu do-

rong lagi kemajuan itu, supaya kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan lagi," ungkap Bupati Teddy Tengko.

Hal ini ditegaskan kembali saat upacara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-7, Kabupaten Kepulauan Aru, berlangsung di lapangan Yos Sudarso, Kota Dobo, Sabtu (18/12), pagi. Bertindak sebagai inpektur upacara adalah Bupati Kepulauan Aru, Teddy Tengko, SH, MHum. Dalam sambutannya, Tengko mengatakan, tujuan dari pemekaran itu di antaranya memperpendek rentang kendali dan mempercepat pelayanan publik, sehingga seluruh aparatur di Kepulauan Aru sanggup menjabarkan tujuan pemekaran itu," ungkap Tengko.

Dalam sambutannya, Tengko juga mengungkapkan, Pada tanggal 1 Desember 2010 lalu, Presiden RI, lewat surat keputusannya, nomor 62/TK/ 2010, telah memberikan Satya Lencana kepada 174 PNS di lingkup pemda Kepulauan Aru yang telah mengabdi selama 30 tahun sebanyak 18 orang, 20 tahun sebanyak 105 orang dan 10 tahun sebanyak 53 orang ," ungkapnya.

Butuh Perhatian Pemprov

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru meminta adanya perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku terhadap kabupaten tersebut, terutama terkait dengan berbagai masalah-masalah yang dihadapi di kabupaten tersebut. "Mereka mengharapkan adanya perhatian dari pemrov terhadap berbagai masalah yang mereka temui di lapangan," ungkap Wakil Gubernur (Wagub) Maluku, Said Assagaf kepada wartawan, di Kantor Gubernur Maluku beberapa waktu lalu.

Assagaf yang melakukan

FOTO: ISTIMEWA

Teddy Tengko, Bupati Kepulauan Aru

kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Aru mengatakan bahwa masalah-masalah yang dimaksudkan tersebut meliputi berbagai bidang, di antaranya menyangkut transportasi laut, transportasi darat serta perikanan dan kelautan.

"Satu hal lagi mereka minta adalah dinaikkannya jatah penerimaan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang selama ini berdasarkan ranking provinsi, sehingga mereka minta di tahun-tahun mendatang ada tambahan jatah bagi siswa-siswa di Kabupaten Aru," jelasnya.

Dikatakan, kunjungan yang dilakukannya ke Kabupaten Kepulauan Aru tersebut bertujuan untuk meminta berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan evaluasi pembangunan tahun 2010.

"Kunjungan ke Pemkab Kabupaten Kepulauan Aru tersebut, terkait dengan disiplin pegawai, perayaan Natal serta saya juga minta masukkan-masukkan dari aparatur Pemkab Kepulauan Aru menyangkut pelaksanaan evaluasi pembangunan tahun 2010," terangnya. ■

FOTO: UTOYO

Optimalkan Kekayaan Alam untuk Kesejahteraan

Kalimantan, kaya akan sumber daya alam. Salah satu daerah yang memiliki potensi menjanjikan itu adalah Kabupaten Gunung Mas.

Oleh: Utoyo Harjito

Kabupaten Gunung Mas memiliki luas 10.804 km² dan merupakan kabupaten terluas keenam dari 14 kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah (7,04% dari luas Provinsi Kalimantan Tengah).

Luas wilayah tersebut terdiri dari kawasan hutan belantara, kawasan pemukiman, sungai, danau, rawa juga daerah pertanian (sawah, ladang, dan kebun). Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kapuas provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2002.

Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu daerah yang masih memiliki potensi alam yang menjanjikan. Salah satunya adalah luas lahan yang masih dapat dimanfaatkan untuk dikelola sebagai sumber usaha yang dapat menjamin kehidupan masyarakat. Bupati Gunung Mas Hambit Bintih, belum lama ini mengatakan, lahan yang masih dapat dimanfaatkan masyarakat ini hendaknya dapat diolah dengan baik untuk lahan perkebunan rakyat maupun lahan pertanian.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya bertumpu pada

satu jenis usaha saja sebagai mata pencaharian. Sebab, jika usaha utama yang dikelola masyarakat kurang menghasilkan, maka usaha sampingan dengan mengelola lahan tidur dapat menjadi usaha alternatif.

"Jika kita perhatikan, Kabupaten Gunung Mas masih memiliki potensi sumberdaya alam yang menjanjikan untuk dikelola secara maksimal. Kalau lahan tidur ini diolah dengan baik, tidak mustahil akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengharapkan satu jenis usaha saja, sebab masih ada alternatif usaha lain dengan memanfaatkan lahan tidur yang ada," tegas Hambit.

Orang nomor satu di Kabupaten Gunung Mas ini menambahkan, saat ini masyarakat harus berfikir jauh ke depan terkait dengan usaha yang akan dikelola.

Mengingat, aturan dan larangan yang diberlakukan pemerintah terkait pertambangan rakyat ilegal yang marak dilakukan masyarakat saat ini adalah murni ketentuan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Sementara pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten hanya menjalankan aturan tersebut.

Hambit Bintih, Bupati Gunung Mas

Secara geografis Kabupaten Gunung Mas terletak pada ± 0° 18' 00" Lintang Selatan s/d 01° 40' 30" Lintang Selatan dan ± 113° 01' 00" Bujur Timur s/d 114° 01' 00" Bujur Timur. Daerah utara merupakan daerah perbukitan, dengan ketinggian antara ± 100-500 meter dari permukaan air laut dan mempunyai tingkat kemiringan ± 8-15° , serta mempunyai daerah pegunungan dengan tingkat kemiringan ± 15-25°.

Pada daerah tersebut terdapat pegunungan Muller dan pegunungan Schwanner dengan puncak tertinggi (Bukit Raya) mencapai 2.278 meter dari pe rmukaan laut. Wilayah Gunung Mas termasuk dataran tinggi yang memiliki potensi untuk dijadikan daerah perkebunan.

Luas lahan yang dimiliki saat ini, menurut Hambit masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Namun, kuncinya adalah kerja keras, karena melalui kerja keras akan menghasilkan buah yang manis dan dapat menjamin kehidupan masyarakat.

"Coba kita perhatikan para pendatang yang ada di daerah

ini, kebanyakan mereka hanya mengandalkan lahan yang ada sebagai mata usaha pertanian yang menghasilkan berbagai jenis sayuran. Dan, buktinya mereka mampu bertahan," ungkapnya.

Gunung Mas juga berbatasan dengan wilayah kabupaten lain, di sisi utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Sanggau (Propinsi Kalbar), di sisi selatan dengan Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya, di sebelah barat dengan Kabupaten Katingan dan Kabupaten Sanggau (Propinsi Kalbar), dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya.

Di bagian selatan terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa yang sering mengalami banjir pada musim hujan.

Kabupaten Gunung Mas juga memiliki sungai yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar daeras aliran sungai (DAS) di antaranya, Sungai Manuhing yang memiliki panjang ± 28,75 km, Sungai Rungan dengan panjang ± 86,25 km, Sungai Kahayan dengan panjang ± 600 km, dan Sungai Miri.

Pemerintahan Gunung Mas juga dibagi dalam 11 kecamatan seperti Kahayan Hulu Utara, Damang Batu, Miri Manasa, Kurun, Manuhing, Manuhing Raya, Rungan, Rungan Hulu, Sepang, Mihing Raya, Tewah.

Dan dari hasil sensus kependudukan 2010 Kabupaten Gunung Mas memiliki jumlah penduduk sekitar 96.838 jiwa dengan klasifikasi 51.385 laki-laki dan 45.453 perempuan serta jumlah Rumah Tangga sebanyak 22.933 KK.

Kepadatan penduduk hanya sekitar10 jiwa per Km2, yang masih terpusat di ibu kota kecamatan sekitar 30,00 persen. Bila kita lihat penyebaran penduduk pada masing-masing wilayah, kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Miri Manasa dengan jumlah penduduk 3.123 jiwa dan kepadatan penduduk per Km2 2,03 jiwa.

Daerah yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Kurun dengan jumlah penduduk 29.224 jiwa dan kepadatan penduduk per Km2 34,71 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 17,36 atau bertambah sebanyak 17.324 jiwa bila dibandingkan tahun 2008.

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi ini diduga dipengaruhi oleh banyaknya migrasi masuk pada perkebunan sawit dan kelahiran. Penyebab kenaikan yang tinggi ini perlu menjadi perhatian Pemda dalam mencermati perkembangannya. Terutama dengan terbukanya lapangan kerja pada sektor perkebunan dan pertambangan. ■

Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Gunung Mas

FOTO: RIA

Penyeberangan dengan perahu di Sungai Kahayan.

Semarak Tahun Baru di Gunung Mas

Bupati Hambit Bintih dan Wakil Bupati Arton S Dohong telah dua tahun memimpin Gunung Mas. Berbagai kebutuhan masyarakatnya telah dipenuhi. Tidak hanya dari sisi pembangunan wilayah namun juga hiburan untuk rakyatnya. Berikut perjalanan PROGRES menyongsong tahun baru di salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah ini.

Oleh: Ria Yusdiana

Selepas senja menjelang 1 Januari 2011, bunyi terompet dan petasan terdengar silih berganti.

Sebagian besar masyarakat Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas terlihat keluar rumah menuju tempat-tempat keramaian. Mereka akan menyongsong pergantian tahun dengan suka cita.

Walaupun sederhana, untuk sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah ini sudah terbilang meriah. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menyediakan tempat untuk masyarakat mengadakan acara malam tahun baru di sebuah lapangan terbuka. Pasar malam pun diadakan untuk menghibur masyarakat, tak ketinggalan komedi putar sebagai hiburan anak-anak.

Kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan dan asesoris perhiasan dijual dengan harga yang lebih murah dari biasanya alias miring. Sudah pasti masyarakatpun tampak antusias pada acara malam itu.

Paling-paling hanya pada perayaan HUT kabupaten atau acara 17 Agustusan masyarakat dapat menyaksikan hiburan. Padahal, kebutuhan akan hiburan sangat diperlukan bagi masyarakat yang jauh dari keramaian. Apalagi suasana Kuala Kurun di Gunung Mas ini relatif sepi dibandingkan dengan ibukota provinsi. "Tempat hiburan memang salah satu kebutuhan yang diperlukan masyarakat," ungkap Maltri, salah seorang warga.

FOTO: RIA

Acara pergantian tahun baru juga dimeriahkan oleh kehadiran musik yang banyak digemari rakyat yakni pertunjukan musik dangdut. Pemerintah setempat menghadirkan artis dari ibukota, Trio Denok.

Suasana di lokasi yang berupa lapangan sangat ramai. Sejak senja para penonton dan para undangan, juga pejabat dan tokoh masyarakat setempat sudah hadir untuk menikmati malam pergantian tahun. Sayangnya kepala daerah berhalangan hadir dikarenakan sakit.

Pukul 23.00 ketika masyarakat sedang asyik menikmati pertunjukan musik dangdut, hujan sempat turun mengguyur. Kontan saja kami berlarian meninggalkan lapangan untuk berteduh. Kendati demikian, hujan tidak mampu menghentikan kemeriahan suasana, Trio Denok mengajak para penonton untuk bernyanyi sambil berjoget bersama.

Tepat jam 00.01, meski hujan tak juga reda namun pergantian tahun yang ditandai dengan kemeriahan cahaya kembang api, suara terompet dan dentuman petasan tetap terlaksana. Di bawah guyuran hujan masyarakat bersorak sorai menyaksikan keindahan langit Kuala Kurun yang dihiasi cahaya kembang api. ■

Jumlah Penduduk Perlu Dikendalikan

Pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Perlu ada aksi untuk kembali menggalakkan Program KB.

Oleh: Eko Caroko

Hasil sensus penduduk 2010 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) memang mengejutkan. Harus diakui kini Indonesia tengah menghadapi konsekuensi sosial ekonomi yang besar akibat ledakan jumlah penduduk yang saat ini mencapai 238 juta orang. Setiap hari rata-rata lahir 10.000 lebih bayi di Indonesia atau setiap tahunnya pertambahan penduduk di Indonesia setara dengan total penduduk Singapura. Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sugiri Syarief, pun mengatakan pertumbuhan penduduk saat ini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan.

Pertambahan penduduk saat ini sekitar 1,49% per tahun, masih jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ideal untuk Indonesia 0,5%. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 ternyata jumlah penduduk Indonesia tercatat 237,6 juta jiwa. Jumlah penduduk sebesar itu telah melampaui proyeksi semula sebesar 233 juta jiwa. Saat ini setiap tahun kelahiran bayi di Indonesia mencapai 4,5 juta. Itu bukan jumlah yang sedikit karena sama dengan jumlah penduduk di Singapura," jelas Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Sonny Harry B Harmadi.

Dengan asumsi pertumbuhan penduduk saat ini, Sonny memproyeksikan jumlah penduduk pada 2060 akan mencapai sekitar 500 juta.

Menurut Mantan Kepala BKKBN merangkap Menko Kesra di era pemerintahan Presiden Soeharto, Haryono Suyono, mengingatkan ancaman ledakan penduduk Indonesia saat ini lebih besar dibanding tahun 1970-an. Sekarang jumlah penduduk yang berusia di bawah 15 tahun jumlahnya sekitar 60 hingga 65 juta. Sementara mereka yang tergolong penduduk subur (berusia antara 15 hingga 60 tahun) jumlahnya lebih dari 150 juta jiwa.

Jika penduduk dewasa subur ini masing-masing mempunyai anak satu saja, "Maka jumlah anak yang dilahirkan oleh keluarga muda ini sudah dua atau tiga kali dari jumlah anak yang dilahirkan keluarga muda pada tahun 1970," kata Haryono.

Bahayanya, tambah Haryono,

FOTO: ISTIMEWA

LONJAKAN PENDUDUK. Salah satu penyebabnya adalah pada tahun 2000 program KB mulai kendur.

anak-anak yang dilahirkan sekarang jauh lebih sehat dibanding kondisi tahun 1970-an, sehingga tingkat kematian anak menurun drastis di bawah 50%. Dan dengan sendirinya mereka akan menambah jumlah penduduk dengan kecepatan jauh lebih tinggi. Menurutnya ada beberapa alasan utama kenapa pertumbuhan penduduk Indonesia meningkat lagi. Salah satunya adalah pada tahun 2000 program Keluarga Berencana (KB) mulai kendur. Ada pandangan yang keliru dari masyarakat, bahwa sekarang tidak perlu lagi KB. "Akibatnya banyak keluarga yang punya banyak anak lagi," tuturnya.

Kondisi di dalam negeri tersebut diperburuk oleh keadaan internasional. Maksudnya PBB juga merasa Indonesia telah lulus dalam program KB, sehingga badan dunia tersebut juga mengendurkan program keluarga berencana di negeri ini. Kurangnya petugas penyuluh keluarga berencana (KB) juga menjadi salah satu penghambat upaya pemerintah mengurangi laju pertumbuhan penduduk. Sebaliknya kondisi ini menjadi pemicu ledakan kelahiran bayi di Indonesia. Dari kebutuhan 40 ribu orang penyuluh KB se-Indonesia, kini baru tersedia sekitar 22 ribu petugas. Menurut Sugiri Syarief, mengatakan bahwa jumlah penyuluh KB mulai menyusut pascXa era reformasi. Dari semula sempat tercatat ada 35 ribu orang, namun pada 2005 menyusut menjadi 19 ribu petugas. "Sekarang naik lagi jadi 22 ribu petugas," kata Sugiri.

BKKBN sesungguhnya menargetkan seorang penyuluh harus dapat melayani dua desa, tetapi rancangan itu terkendala kebijakan Kementerian Aparatur Negara dan anggaran pemerintah daerah. Untuk menutupi kekurangan petugas penyuluh KB, BKKBN melatih para dokter dan bidan. Itu pun baru separuhnya. "Di Indonesia ada 130 ribu bidan, masih ada 70 ribu bidan yang masih perlu dilatih," katanya.

Sasaran tugas penyuluh keluarga berencana tersebut adalah masyarakat miskin. Alasannya, kata Sugiri, tingkat kelahiran bayi di kalangan tersebut sangat tinggi. Sejak 1970-2010, pertambahan penduduk di Indonesia mencapai 100 juta orang. Sedangkan peserta keluarga berencana saat ini tercatat ada 28 juta pasangan.

Ada pun Jawa Barat yang menyandang sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, kesulitan meredam ledakan populasi. Selain kekurangan 500 penyuluh, menurut Sekretaris BKKBN Jawa Barat, Saprudin Hidayat, angka kawin muda cukup tinggi. "Penduduk Jabar mengelembung di usia produktif, angka usia kawinnya 40% sampai 64% dari komposisi penduduk," kata Saparudin.

BKKBN Jawa Barat menargetkan pengurangan angka kelahiran bayi dari 730 ribu per tahun menjadi 600 ribu kelahiran. Setiap pasangan diminta hanya punya dua anak saja. Jika tidak, kata Saprudin, ledakan penduduk akan menyulitkan tersedianya lapangan kerja. "Selain itu, wilayah yang padat penduduknya bakal menimbulkan masalah sosial ekonomi," simpulnya.

Salah satu dampak dari ancaman ledakan penduduk adalah tersedianya lapangan kerja yang makin menyempit. Hal tersebut disampaikan oleh Prof Sri Moertiningsih Adioetomo, guru besar Ekonomi Kependudukan. Populasi jumlah usia kerja yang meningkat itu disebabkan karena usia harapan hidup masyarakat juga naik. Ledakan penduduk usia produktif (15-65) ini jika tidak dibenahi dari sekarang, baik kualitas maupun kesempatan kerjanya, nantinya hanya akan menjadi beban tersendiri. ■

Perkembangan Jumlah Penduduk Indonesia

Tahun	Jumlah Penduduk (juta jiwa)
1930	60,7
1961	97,1
1971	119,2
1980	146,9
1990	178,5
2000	205,1
2010	237,6

Sumber: Biro Pusat Statistik

Ribuan pelamar padati bursa kerja.

FOTO: ISTIMEWA

FOTO: ISTIMEWA

Prioritaskan Pembangunan untuk Rakyat

Kabupaten Teluk Bintuni telah memasuki babak baru pemerintahan Alfons Manibui dan Akuba Kaitam. Pasangan bupati dan wakil bupati untuk periode 2010-2015 itu kembali dipercaya masyarakat untuk memimpin kabupaten yang terletak di Provinsi Papua Barat ini.

Oleh: Iwan Hamka

Kepercayaan masyarakat itu cukup beralasan, mengingat kemajuan yang dicapai pasangan itu sangat signifikan. Lihat saja indeks pembangunannya yang semakin meningkat rata-rata 1 hingga 2 point pertahun. Secara nasional IPM Bintuni menempati urutan 400, namun dalam lingkup propinsi Papua Barat menempati urutan ke 7. Posisi tersebut masuk dalam kategori menengah bersama dengan Kab. Manokwari, Teluk Wondama, Sorong Selatan dan Raja Ampat.

Di bawah kepemimpinan pasangan tersebut, masyarakat Kabupaten Bintuni mengalami peningkatan kesejahteraan.

Dulu, jalan di Kota Bintuni masih sedikit yang beraspal, tapi kini ruas jalan di tengah kota sepanjang 6 km terlihat mulus lantaran sudah dilapisi aspal. Infrastruktur publik seperti pasar besar juga telah selesai pembangunannya. Pembangunan pasar besar tersebut bertujuan untuk mendukung kegiatan perdagangan yang mampu memutar roda perekonomian masyarakat.

Selain itu akses transportasi udara bagi pergerakan arus barang dan orang juga terus ditingkatkan. Bahkan maskapai penerbangan yang membuka jalur ke kota ini sudah mulai ramai. Sebut saja Merpati Nusantara Airlines, Express Air dan beberapa maskapai lainnya.

"Frekuensi terbangnya sekarang sudah cukup tinggi. Akses dari Manokwari ke Bintuni atau sebaliknya mencapai 3-4 kali per hari, ke Sorong 1 kali per hari dan dari Bintuni ke Babo juga tersedia jalur penerbangan setiap hari," ungkap Alfons.

Landasan pacu bandara ditingkatkan panjangnya hingga mencapai 1.600 meter. Hal itu ditujukan agar pesawat-pesawat berbadan besar mampu mendarat di Kabupaten Bintuni.

Di lain sisi, sumber daya alam yang terdiri dari berbagai bahan tambang juga dimiliki kabupaten Teluk Bintuni. Gas alam, minyak, nikel juga batubara dengan kualitas terbaik, tersimpan dalam jumlah yang cukup besar. Maka tak heran apabila Bupati mengeluarkan kebijakan untuk mengundang investor menanamkan modalnya di sana. Semua yang dilakukan itu tak lain sebagai upaya untuk membangun Bintuni dari ketertinggalan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Karena diharapkan dengan adanya investasi yang masuk ke daerah Bintuni, akan memberikan peluang bagi penyerapan tenaga kerja masyarakat Bintuni.

FOTO: RIA

Alfons Manibui, Bupati Teluk Bintuni beserta istri.

"Soal perizinan tidak ada masalah. Apapun model investasinya, sepanjang menurut kajian Pemkab dapat meningkatkan ekonomi daerah dan ekonomi rakyat, pasti akan mendapat dukungan penuh," jelas Alfons.

Selain melimpahnya gas bumi dan bahan tambang, Kabupaten Teluk Bintuni memiliki tanah yang subur.

Untuk itulah dinas pertanian berupaya untuk mengembangkan sektor pertanian agar dapat mencukupi kebutuhan pangan

FOTO: ISTIMEWA

masyarakat bahkan diharapkan mampu menjadi lumbung padi di provinsi Papua Barat.

Wilayah dengan luas sekitar 18.658 km persegi tersebut memiliki tanah yang cocok bagi beragam komoditi pertanian dan perkebunan. Dari seluruh luas kabupaten tersebut, 620.760 hektar di antaranya adalah lahan potensial pertanian. Hingga saat ini baru 11.133 hektar lahan potensial pertanian yang dimanfaatkan," ujarnya.

Komoditi pertanian seperti padi, jagung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, pisang hingga jeruk manis, rambutan, dan durian dapat tumbuh dan berkembang dengan sangat baik di Kabupaten tersebut. Banyak petani yang berhasil mengembangkan komoditi–komoditi tersebut. Fakta ini mendorong Pemerintah Kabupaten menetapkan sektor Pertanian sebagai salah satu Prioritas Pembangunan.

Salah satu target Pemerintah Kabupaten Teluk bintuni adalah swasembada beras pada tahun 2010. Langkah menuju target itu dilakukan dengan perluasan lahan sawah dan ladang untuk padi. Saat ini, luas lahan untuk padi 545 hektar terdiri dari 460 hektar sawah dan 85 hektar ladang.

"Tanah Teluk Bintuni yang subur pun cocok dengan komoditi perkebunan seperti kelapa sawit dan kakao. "Saat ini kami tengah mengembangkan perkebunan kelapa sawit seluas 7.500 hektar.

Untuk sektor perkebunan, budidaya tanaman nilam akan terus digenjot untuk menunjang program produksi bio etanol.

"Saat ini tawaran dari pemerintah pusat untuk tanaman singkong diolah dalam pembuatan bio fuel. Dari peternakan kami mulai membuka sentra produksi peternakan yang dimulai dari

"Soal perizinan tidak ada masalah. Apapun model investasinya, sepanjang menurut kajian Pemkab dapat meningkatkan ekonomi daerah dan ekonomi rakyat, pasti akan mendapat dukungan penuh," jelas Alfons.

FOTO: ISTIMEWA

FOTO: M PRIYADI

pembibitan ayam kampung, kambing, dan sapi lengkap dengan laboratorium klinik hewan yang berlokasi di SP-4 Distrik Manimeri," kata Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan, Muhammad Yamin Bauw, S.Pt.

Langkah ini, lanjut M Yamin, diambil sebagai upaya untuk menciptakan ekonomi kerakyatan berbasis rumah tangga sesuai cita-cita pasangan bupati Teluk Bintuni dan wakilnya.

"Pertanian merupakan salah satu unggulan Teluk Bintuni. Namun, kegiatan usaha tani yang dilakukan sesuai kebiasaan masyarakat sehari-hari dengan teknologi sederhana, perlu dikembangkan dengan menerapkan pola-pola pertanian semi-modern atau yang lebih canggih," kata Yamin lagi.

Kabupaten yang dipimpin Drg Alfons manibui, DESS dan Wakil Bupati Drs H. Akuba Kaitam tersebut juga kaya akan hasil hutan. Kayu dari Teluk Bintuni telah menarik perhatian para pemegang HPH. Saat ini telah sembilan pemegang HPH yang beroperasi di Teluk Bintuni.

Meski demikian, Alfons tidak berharap banyak dari hasil pengolahan hutan. Menurutnya setelah sekian lama kayu dari hutan Bintuni diambil, manfaat yang dirasakan masyarakat tidak signifikan.

"Untuk setiap meter kubik kayu yang diambil, masyarakat hanya mendapatkan sekitar Rp.80 ribu hingga Rp.100 ribu sebagai kompensasi hak ulayat," ujar Alfons, prihatin.

Kekayaan teluk Bintuni tidak hanya dipermukaan tanah. Perut bumi Kabupaten berpenduduk 50 ribu jiwa inipun kaya dengan berbagai potensi pertambangan. Cerita kekayaan alam Teluk Bintuni ini telah dimulai sejak zaman Belanda. Beberapa ladang minyak pernah dioperasikan oleh Pemerintah kolonial.

Selain minyak bumi teluk Bintuni pun memiliki kandungan batubara dan emas. Meskipun kaya akan potensi pertambangan, Pemkab Teluk bintuni tidak ingin silau dengan semua itu dan terburu-buru mengeksploitasinya.

"Kami tetap menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas, karena inilah yang dimiliki oleh rakyat, " kata Alfons. Kesuburan lahan untuk pengembangan inilah yang akan membawa seluruh rakyat Teluk bintuni menatap masa depan yang lebih baik. ■

FOTO: ISTIMEWA

Cobek Kokom

Resto Mewah Harga Murah

Konsep makanan tradisionil yang disajikan di restoran modern sedang menjadi tren saat ini. Bahkan nama restorannya pun dibikin sekampungan mungkin. Contohnya restoran bakul sunda, empal gentong, warung pincuk atau seperti yang PROGRES datangi sekarang ini namanya Cobek Kokom.

Oleh: Iwan Hamka

Restoran Cobek Kokom terletak di sebuah jalan protokol ibukota yang dikelilingi gedung-gedung perkantoran. Restoran ini sudah berdiri sejak tahun 1998. Tempatnya tidak terlalu besar tapi cukup menampung sekitar 50-60 orang. Terdiri dari dua lantai. Setiap lantai berisi sekitar 10 meja dan setiap meja bisa digunakan untuk 4 orang. Kalau pengunjungnya membludak, petugas restoran biasanya menyiapkan meja dan kursi tambahan yang siap digelar. "Sebagai *emergency* supaya pengunjung tidak kecewa", kata Kokom Komala si pemilik resto tersebut kepada PROGRES.

Pengunjung yang biasa datang ke resto Cobek Kokom tentu saja orang-orang kantoran di sekitar situ. "Hampir 60% pegawai kantoran di sekitar sini Mas," jelas Kokom. "Selebihnya masyarakat umum yang tau tempat ini lewat omongan dari mulut ke mulut," tambahnya lagi.

Dilihat dari tempatnya, resto dengan logo CK itu memang berbeda dari resto biasanya. Selain tempatnya cukup bersih, penerangannya pun cukup memadai. Asesoris peralatan dapur tradisional seperti cobek, bakul, gentong, gayung batok kelapa, tertata apik dan unik disetiap sudut ruang.

Di tengah ruang berdiri 2 tiang penyangga yang terbuat dari batang kayu kelapa yang sudah di modifikasi dengan pelitur. Tiang penyangga itu bagian dari asesoris, sehingga kelihatan cukup antik dan mewakili suasana kampung. Di bawahnya ada wastafel tradisional terbuat dari wajan tanah liat sebagai tempat mencuci tangan. Semuanya kelihatan kuno tapi antik. Seperti mengajak pengunjung untuk mengenang kembali jaman "susah".

Tidak itu saja, disetiap dinding ruangan itu, pengunjung dapat menikmati foto-foto kota Jakarta jaman "beheula". Dengan kualitas gambar yang masih lumayan meski warnanya hitam putih. Namun karena dalam ukuran sedikit besar dan dipadu dengan tata cahaya lampu sorot terlihat jadi agak dramatis. Mungkin angan kita akan terhanyut ke masa lampau ketika melihat foto kali Ciliwung yang masih digunakan sebagai tempat pemandian bagi warga Betawi, dengan di kiri kanan jalan tanah yang dilewati delman. Kini jalan itu adalah Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk. Masih banyak lagi foto-foto menarik yang bisa Anda lihat sambil menunggu hidangan yang Anda pesan.

Resto Cobek Kokom memiliki hidangan khas makanan rumahan. Menu yang disajikanpun tidak unik-unik dan tidak aneh-aneh. Semuanya sesuai dengan selera lidah "melayu". Ada sambel terasi, sambel jeruk limau, sambel gAndaria juga sambel goreng sereh. Masakannya pun terdiri dari makanan yang biasa kita jumpai di rumah. Sederhana namun klik dengan lidah. Contohnya sayur asem, sayur lodeh, sayur bening. Juga jenis-jenis ikan, mulai dari ikan mas sampai ikan laut baik yang dibakar maupun yang digoreng. Belum lagi lalapan yang terdiri dari berbagai sayuran yang biasa dimakan mentah. Dan masih banyak lagi masakan yang bisa Anda jumpai

sesuai selera Anda.

Cara pemesanan

Berbeda dengan restoran biasa, cara pemesanan menu di resto Cobek Kokom tidak menggunakan daftar menu makanan. Tetapi lewat contoh makanan yang disajikan etalase. Ada empat etalase besar yang menampilkan contoh makanan yang bisa Anda nikmati. Anda tinggal tunjuk sesuai selera. Dan pelayan siap mengantarkan. Biasanya makanan yang Anda pesan akan dipanaskan terlebih dahulu dengan *microwave* sebelum sampai ke meja Anda. Jadi Anda dapat menikmati sajian makanan hangat atau panas sesuai keinginan. Sedangkan untuk nasi disajikan melalui bungkusan daun pisang. Satu bungkus cukup untuk mengganjal perut lapar. Tapi kalau mau agak sedikit kenyang bisa Anda ambil dua seperti yang PROGRES lakukan sekarang. Terserah Anda.

Setelah memilih jenis makanan yang diinginkan, Anda tinggal mencari meja atau kursi kosong dengan membawa nomor pemesanan. Hal itu dimaksudkan agar pelayan nanti tidak tersesat mengantarkan makanan kemeja orang lain. Begitu Anda duduk pelayan lainnya langsung datang menanyakan minuman yang Anda inginkan. Bermacam-macam minuman yang ditawarkan baik panas maupun dingin. Anda tinggal pilih dan sekali lagi terserah Anda.

Seluruh proses pemesanan hingga sampai tersaji di meja Anda hanya memerlukan waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Tergantung banyaknya menu yang Anda pesan. Yang pasti Anda tidak dibiarkan berlama-lama menahan perut lapar.

Meski pun resto Cobek Kokom terlihat agak mewah dan terletak dilokasi perkantoran, namun soal harga tak perlu khawatir akan menguras dompet Anda. Karena harga makanan yang dibandrol relatif murah untuk ukuran karyawan kantor. Apalagi ditunjang dengan suasana yang santai dan sejuk dengan suguhan musik-musik lembut pengantar Anda makan siang. Juga ada 2 buah televisi layar LCD ukuran 37 inchi melengkapi dua dinding yang berlawanan disetiap ruangan. Membuat Anda malas beranjak setelah makan.

Jumlah tenaga kerja

Resto Cobek Kokom mempekerjakan sekitar 25 orang karyawan dan karyawati.

Rata-rata usia mereka sekitar 17 hingga 25 tahun. Dan berpendidikan minimal SMP hingga SMA. Meski demikian mereka cukup profesional layaknya pelayan hotel berbintang.

"Sebelum mereka terjun sebagai pelayan, mereka sudah dibekali pengetahuan cara pelayanan yang baik. Istilahnya di *trening gitu lah*," kata Kokom Komala yang mantan guru tata boga di sebuah SMK di Jakarta.

Untuk masalah pelayanan, mereka dibagi dalam 3 bagian. Bagian menu, bagian dapur dan bagian antar. Setiap bagian ditandai dengan seragam yang berbeda. Ketiga bagian itu harus sinkron satu sama lain. Dan ketiga bagian itu akan bergantian setiap minggu atau istilah mereka di*rolling*.

Dijelaskan Kokom bahwa pelatihan melayani adalah syarat mutlak sebelum terjun sebagai pelayan di resto Cobek Kokom. Apalagi resto ini sudah cukup dikenal di kalangan tokoh-tokoh masyarakat hingga para selebriti. "Bahkan ada beberapa mantan menteri dari kabinet pemerintahan terdahulu yang masih sering datang di sini," jelas Kokom. Tanpa perlu dijelaskan, PROGRES melihat suvenir-suvenir berupa piring yang di tandatangani oleh orang-orang yang dikenal masyarakat luas di sertai pesan dan kesannya menikmati makanan di resto Cobek Kokom.

Untuk masalah penggajian karyawannya, Kokom Komala si pemilik resto Cobek Kokom

FOTO: ISTIMEWA

tidak menjelaskan secara rinci kepada PROGRES. Namun yang pasti dia bilang gaji yang terendah sebesar 1.200.000 rupiah plus tunjangan lembur hari libur ditambah makan gratis yang khusus dimasak untuk karyawan.

"Yang penting mereka tidak jadi pengangguran mas. *Kasian* mereka *udah* sekolah mahal-mahal, pas lulus malah jadi pengangguran," jelas Kokom yang ternyata sangat memiliki kepekaan terhadap nasib masyarakat kecil. ■

Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di tanah air terus dilakukan melalui berbagai macam program. Baik melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir sebagai modal usaha, pembangunan sarana dan prasarana dasar maupun pendampingan usaha. Namun semua itu dirasakan belum cukup karena masalah kemiskinan merupakan masalah kompleks yang sifatnya multidimensi.

Pada edisi ini PROGRES mencoba menyajikan pidato Prof. Dr. Mohamad Ikhsan yang berkaitan dengan masalah penanggulangan kemiskinan, disampaikan pada pengukuhannya sebagai Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada akhir Nopember 2010 lalu.

Tulisan di bawah ini merupakan bab pertama dari pidato beliau yang berjudul Kebijakan Ekonomi Makro Khususnya Stabilisasi Harga dan Penanggulangan Kemiskinan. Berikut kutipannya.

Mengapa Penanggulangan Kemiskinan Masih Menjadi Agenda Penting Pembangunan Hingga 1-2 Dekade ke Depan

Kemiskinan adalah masalah multidimensional yang penanganannya tidak hanya menyangkut agenda atau kebijakan ekonomi semata tetapi juga menyangkut agenda kebijakan sosial, politik dan budaya. Memahami persoalan ekonomi keluarga miskin saja belum cukup memadai untuk membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan yang efektif. Meski demikian, masalah ekonomi tetap menjadi inti dari masalah kemiskinan. Dalam kebijakan ekonomi, ekonomi makro merupakan fundamentalnya. Jadi pemahaman tentang keterkaitan antara kebijakan ekonomi makro menjadi kunci utama menyusun kebijakan anti kemiskinan.

Walaupun telah mencatat kemajuan yang berarti dalam penurunan angka kemiskinan baik dalam periode 1970an hingga 1996 dan antara 2000-2010, kemiskinan akan tetap menjadi isu penting dalam agenda pembangunan. Ada beberapa alasan mengapa kemiskinan akan tetap menjadi agenda penting dalam pembangunan Indonesia bahkan hingga dua dekade mendatang. *Pertama*, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tergolong besar. Per Maret 2010, masih terdapat 7 juta penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin, yakni mereka yang belum dapat memenuhi kebutuhan minimal 2100 kalori per kapita per hari. Jumlah penduduk miskin bertambah secara signifikan jika kebutuhan non makanan dimasukkan dalam garis kemiskinan. Kurang lebih 31 juta penduduk belum dapat memenuhi kebutuhan hidup pokok (*basic need*) yang diukur dengan garis kemiskinan nasional. Jumlah penduduk miskin akan bertambah secara signifikan jika garis kemiskinan dinaikkan 30% hingga mencapai $2 PPP/kapita, yakni hampir separuh penduduk Indonesia masuk kategori penduduk miskin.

Prof. Dr. Mohamad Ikhsan,
Staf Khusus Wakil Presiden RI.

Kedua, menyangkut masalah penduduk yang rentan. Dua dari sepuluh orang Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Bencana dan musibah dapat dengan mudah membuat orang yang tadinya tidak miskin menjadi miskin. Dampak dari kejadian-kejadian yang tidak diharapkan terhadap rumah tangga seperti penyakit, bencana alam ataupun krisis ekonomi global, dan guncangan lain akibat reformasi kebijakan, dapat menghambat upaya pengentasan kemiskinan. Kejadian bencana alam Gunung Merapi misalnya hampir dipastikan dapat meningkatkan jumlah orang miskin yang cukup signifikan, walaupun diperkirakan tidak meningkatkan persentase tingkat kemiskinan secara nasional.

Ketiga, menyangkut dimensi kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia memiliki berdimensi jamak, bukan sekedar diukur berdasarkan kesenjangan konsumsi. Perluasan definisi kemiskinan yang mencakup dimensi kebutuhan dasar hidup lain termasuk akses terhadap pelayanan umum mengubah potret kemiskinan. UNDP dalam laporan Global Human Development Report 2010 yang baru diluncurkan dua minggu lalu memperlihatkan indeks kemiskinan Indonesia mengalami peningkatan saat dimensi kemiskinan diperluas. Gambaran ini memberikan implikasi bahwa rumah tangga miskin Indonesia bukan hanya memiliki defisit dalam bentuk konsumsi tetapi juga defisit dalam kebutuhan hidup dasar lainnya. Analisis kuantitatif menunjukkan adanya korelasi yang kuat antar dimensi kemiskinan tersebut. Namun belum diketahui secara jelas apakah defisit dalam kebutuhan dasar ini mempunyai hubungan kausalitas terhadap defisit kesenjangan konsumsi.

Kemiskinan di Indonesia juga memiliki heterogenitas yang tinggi baik dilihat dari penyebab kemiskinan sendiri maupun lokasinya. Jumlah penduduk miskin pun sangat heterogen dan berbeda-beda penyebabnya. Ada daerah yang tingkat kemiskinannya sudah sangat minimum -seperti Jakarta -tetapi masih banyak daerah dimana porsi penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum 2100 kalori per hari masih sangat besar -seperti Papua dan NTT. Penyebabnya pun berbedabeda. Sebagian karena faktor *endowment* seperti rendahnya pendidikan atau persoalan kepemilikan aset, seperti lahan, tetapi banyak pula daerah terjebak dalam perangkap kemiskinan karena persoalan isolasi.

Heterogenitas permasalahan ini memberikan isyarat kebijakan anti kemiskinan harus disasarkan kepada faktor-faktor penyebabnya. Hal ini berarti kebijakan anti kemiskinan seperti yang saya uraikan akan berbeda-beda untuk setiap daerah. *No one size fits all*. Pola kebijakan pembangunan yang tersentralisasi seperti yang dilakukan pada era 1970an hingga 1990-an dan berhasil pada saat itu, belum tentu akan berhasil jika diterapkan kembali pada masa kini. Kebijakan anti kemiskinan yang terdesentralisasi seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) lebih mampu menjawab persoalan lokal. Namun karena *benefit* per kapitanya masih relatif rendah, dampaknya kepada agregat kemiskinan belum banyak dirasakan.

Tantangan yang dihadapi baik dalam penyusunan kebijakan hingga implementasinya pun makin kuat akibat dari perubahan lingkungan global dan tuntutan perubahan politik dalam negeri seperti desentralisasi dan proses transisi menuju demokrasi.

Globalisasi adalah suatu proses yang tak terelakkan khususnya terhadap perekonomian yang terbuka seperti Indonesia. Pada satu sisi, globalisasi akan menciptakan kesempatan bagi para pelaku ekonomi termasuk kelompok miskin untuk berpartisipasi di pasar global. Tetapi di sisi lain globalisasi juga akan menciptakan risiko yang cukup tinggi bagi golongan miskin, khususnya ketika terjadi goncangan eksternal yang akhir-akhir ini frekuensinya semakin sering.

Tantangannya adalah bagaimana membuat kelompok miskin dapat berpartisipasi secara penuh dalam proses globalisasi dan dapat mengambil manfaat optimal dari proses globalisasi dan pada waktu bersamaan menyediakan dan mempersiapkan mereka untuk mampu menghadapi berbagai guncangan atau gejolak yang diakibatkan oleh globalisasi tersebut. Proses perubahan ini tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Dalam masa transisi selalu timbul biaya tambahan yang harus ditanggung pemerintah mengingat kelompok yang lambat menanggapi perubahan ini biasanya kelompok rumah tangga miskin dan rentan. Jadi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah pun sangat berat yaitu harus memperkuat kemampuan rumah tangga miskin melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan -yang dampaknya baru akan terasa dalam jangka menengah dan panjang dan sekaligus menyiapkan jaring pengaman sosial sebagai bagian dari biaya transisi.

Tantangan lain adalah perubahan teknologi yang telah mengakibatkan kandungan tenaga kerja untuk setiap kegiatan produksi mengalami penurunan. Tanpa ada perubahan dalam basis kegiatan ekonomi, perubahan ini akan diterjemahkan dalam penurunan elastisitas penciptaan lapangan kerja per satu persen pertumbuhan ekonomi. Dahulu kita bisa menciptakan 400 ribu tenaga kerja untuk setiap 1% pertumbuhan ekonomi, dewasa ini hanya sekitar 200 ribu saja lapangan kerja baru yang bisa tercipta sebagai akibat ekspansi 1% perekonomian nasional Bank Dunia, 2009).

Reformasi pasar pun tidak akan selalu otomatis menguntungkan penduduk miskin. Di banyak kasus, golongan miskin akan mudah menjadi korban dari reformasi yang dijalankan. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa reformasi institusi merupakan elemen penting untuk menjamin golongan miskin agar tidak menjadi korban dari reformasi ini. Reformasi institusi dalam hal ini akan dapat menjadi modal yang efektif untuk melaksanakan program yang tertarget. Sebagai contohnya, saat PLN diizinkan untuk menentukan tarif yang kompetitif untuk memperluas kemampuan melakukan ekspansi jaringan dan aksesibilitas, pemerintah secara bersamaan perlu memberikan dana kompensasi sosial yang menjembatani kemampuan membayar rumah tangga miskin dan biaya produksi. Langkah ini telah diimplementasi sejak tahun 2002 dimana subsidi listrik bukan subsidi kepada PLN tetapi subsidi kepada pelanggan kecil. Pola ini berubah sejak kenaikan harga minyak tahun 2005 dimana subsidi kepada pelanggan kecil berubah menjadi subsidi kepada semua pelanggan. Bahkan pelanggan besar menikmati *benefit* per kapita lebih besar dibandingkan dengan pelanggan kecil (*Ikhsan, forthcoming*).

Tantangan lain adalah meningkatnya kemiskinan di daerah perkotaan dan perkiraan

meningkatnya penduduk kelompok usia tua. Fenomena ini belum terlalu terlihat dalam 5-10 tahun ini tetapi akan menjadi masalah besar jika tidak ditangani segera. Masalah ini juga merupakan masalah baru dan keduanya dapat dipastikan akan menyebabkan biaya penanggulangan kemiskinan makin tinggi.

Pemberlakuan desentralisasi dilandasi oleh adanya perubahan lingkungan yang ada dalam masyarakat. Secara teoretis, desentralisasi adalah kebijakan yang pro atau mendukung orang miskin karena desentralisasi akan menyediakan jasa publik yang efektif dan efisien.

Perspektif tentang program pengentasan kemiskinan dan heterogenitas yang dihadapi golongan miskin di Indonesia menunjukkan pula kebijakan anti kemiskinan hanya dapat ditangani oleh program-program daerah bukan program-program nasional seperti pada masa lampu. Sehingga, desentralisasi dalam bentuk pelimpahan tugas pemerintah pusat ke daerah merupakan respon yang tepat.

Tetapi kondisi yang ada dan merujuk pada pengalaman negara lain termasuk pengalaman hampir lima tahun pelaksanaan desentralisasi di Indonesia menunjukkan hasil yang berbeda dengan yang diharapkan. Sebagai salah satu contoh di Filipina kuantitas dan kualitas barang dan layanan publik semakin menurun setelah kebijakan desentralisasi diluncurkan. Kondisi ini mengkibatkan golongan miskin akan menjadi korban karena buruknya penyediaan prasarana publik oleh pemerintah daerah. Walaupun berbagai studi menunjukkan tidak ada bukti yang sistematis yang menunjukkan penurunan kuantitas dan kualitas barang publik, tetapi yang jelas tujuan dari desentralisasi untuk memperbaiki penyediaan barang dan jasa publik yang lebih efisien belum sepenuhnya tercapai. Diperlukan studi yang lebih mendalam mengapa antara teori dan realisasi ada perbedaan yang cukup mencolok yang terjadi di banyak negara berkembang yang menjalankan desentralisasi.

Kebijakan anti kemiskinan yang terdesentralisasi juga terhambat oleh perbedaan yang mencolok dari kapasitas perencana dan pelaksana di daerah khususnya di tingkat kabupaten/kota. Daerah yang relatif miskin umumnya juga memiliki kesenjangan kapasitas yang besar. Tambahan DAU atau DAK atau melalui proyek dekonsetrasi untuk mendorong percepatan penurunan kemiskinan seringkali tidak efektif. Hal ini ditunjukkan oleh analisis kuantitatif yang mencoba melihat korelasi antara DAU dengan dampak kemiskinan yang menunjukkan hubungan yang negatif.

Reformasi program pengentasan kemiskinan juga terhalang oleh transisi demokrasi dimana demokrasi tidak dapat berjalan secara baik dan kelompok miskin tetap tertekan di pasar politik. Suara golongan miskin sering dimanipulasi oleh kelas menengah dan atas dimana mereka dapat mengendalikan kondisi politik dan opini publik. Salah satu kasus menarik yang dapat dijadikan contoh adalah penundaan tentang penyesuaian harga BBM. Kelas menengah enggan menerima penyesuaian harga karena mereka penerima subsidi BBM terbesar, walaupun penyesuaian BBM ini -jika anggaran yang dihemat dari penyesuaian BBM dialokasikan untuk program anti kemiskinan- akan membantu golongan miskin. Konsultasi dengan golongan miskin mungkin merupakan solusi. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana cara menjamin bahwa seluruh impelentasi program selalu mendukung golongan miskin.

Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa pemberdayaan merupakan pilar utama dari strategi baru pengentasan kemiskinan.

Pemerintah pun dalam era sekarang tidak bisa dengan leluasa melakukan kebijakan anggaran karena berdasarkan UU No. 17/2003 harus selalu berkonsultasi dengan DPR. Perubahan ini di satu pihak akan memberikan akuntabilitas dengan melalui *checks and balances* yang lebih baik tetapi juga mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya. Contoh yang paling aktual adalah penggunaan dana BBM. Walaupun dana penghematan subsidi tersedia, tetapi pemerintah tidak bisa membelanjakannya dalam program kompensasi karena berdasarkan UU setiap pos pengeluaran harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

Tantangan di atas makin diperkuat dengan kenyataan banyak kebijakan fiskal sebagai instrumen sentral dalam pengurangan kemiskinan gagal mencapai tujuan yang hendak di capai. Sebagai salah satu contoh yaitu subsidi BBM. Data Susenas secara konsisten menunjukkan bahwa sebagian besar subsidi lebih banyak dinikmati oleh golongan kaya dibandingkan dengan golongan miskin. Implikasi dari pengurangan subsidi BBM melalui pelepasan harga BBM merujuk harga pasar akan memperbaiki distribusi pendapatan, tetapi di lain pihak kemiskinan absolut akan naik secara tajam. Kombinasi program pengurangan subsidi dengan lebih memperjelas target program kompensasi tidak hanya akan memperbaiki distribusi pendapatan (baca keadilan) tetapi mengurangi kemiskinan absolut secara signifikan. Langkah inilah yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga BBM pada tahun 2005 dan 2008.

Karakteristik kemiskinan dan tantangan-tantangan tersebut di atas menyebabkan program anti kemiskinan akan terus menjadi agenda penting pembangunan hingga dua dekade mendatang, walaupun sasarannya bisa berbeda. Apalagi jika definisi dan sasaran kemiskinan diperluas hingga mencakup kelompok hampir miskin, sumber daya yang dimiliki pemerintah tidak akan cukup mengatasi masalah kemiskinan ini sebagai akibat makin meningkatnya biaya per penduduk miskin, meningkatnya kompleksitas kemiskinan sendiri hingga persoalan lokasi yang makin tersebar. ■

Kegiatan **TNP2K**

JANUARI 2011		
31 Januari 2011	Rapat TNP2K dengan World Bank dan Kementerian	Membangun Strategi Komunikasi yang Efektif
28 Januari 2011	Rapat TNP2K	Paparan Hasil Kajian KUR
27 Januari 2011	Rapat TNP2K	Rapat Financial inclusion
26 Januari 2011	TNP2K	Rapat Identifikasi Proses Program Keluarga Harapan
26 Januari 2011	TNP2 dan World Bank	Internal
26 Januari 2011	TNP2K	Rapat Unifikasi Data Bidang Kesehatan
26 Januari 2011	Kesra Setwapres	PBI Kesra
25 Januari 2011	TNP2K	Financial Inclusion dengan World Bank
20 Januari 2011	TNP2K dan Prof. Menno Pradhan dari University of Amsterdam	Pemaparan Hasil Studi Evaluasi Dampak Peran Komite Sekolah
17 Januari 2011	TNP2K	Rapat Terbatas
12 Januari 2011	TNP2K dan PNPM	Rapat Koordinasi Tim Kajian
11 Januari 2011	TNP2K dan World Bank	Rapat Financial Inclusion
10 Januari 2011	TNP2K	Rapat Cash For Work
7 Januari 2011	TNP2K dan Pokja	Rapat dengan PNPM Mandiri dng World Bank
6 Januari 2011	TNP2K dan KEMENDAGRI, KESRA	Rapat Cash for Work
3 Januari 2011	TNP2K	Targeting Eksperimen dan Koordinasi PKH dengan BPS.

FOTO-FOTO: SUTIKNO

Deputi Seswapres Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan Bambang Widianto selaku sekretaris eksekutif TNP2K sedang memberikan pengarahan pada acara Rapat Koordinasi penanggu-langan kemiskinan antara TNP2K dengan TKPK kabupaten/kota se-provinsi Sumatera Selatan (21/1).

Tonno Supranoto, Kepala Sekretariat TNP2K selaku Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat Menko Kesra dan Sujana Royat selaku Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat yang juga selaku Ketua Tim Pemulihan Kegiatan Ekonomi Masyarakat di Lokasi Bencana pada Masa Transisi Darurat ke Pemulihan sedang melakukan rapat pleno pelaksanaan program Padat Karya Tahap 1 dengan materi pembahasan Laporan Akhir Pelaksanaan Program Cash for Work Tahap I di kantor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta.

Spanduk Selamat Datang kepada Wakil Presiden RI di kota Palembang dalam acara pertemuan Wapres dengan KSM PNPM Mandiri, Penyuluh KB, Kader Posyandu dan Petugas kesehatan kota Palembang (21/1).

Sujana Royat selaku Ketua Tim Pemulihan Kegiatan Ekonomi Masyarakat di Lokasi Bencana pada Masa Transisi Darurat ke Pemulihan, berbincang-bincang dengan masyarakat yang melakukan kegiatan *Cash for Work*.

PIAGAM KESEPAKATAN

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi bersama-sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyepakati untuk meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dalam rangka percepatan pencapaian target penurunan tingkat kemiskinan.

Jakarta, 29 November 2010

Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK) Provinsi Seluruh Indonesia
dengan
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)